

Pengaruh Faktor-Faktor Inflasi terhadap Investasi Asing Langsung dan Pengangguran serta Dampaknya Kepada Daya Beli Masyarakat di Indonesia

*Oleh : Fransisca Sestri *)*

ABSTRACT

Background problem of this research was the inflation in Indonesia considered to be still higher than that in the other ASEAN countries, the rate still needed control to attract foreign direct investments which were decreasing in the recent years. The form of foreign direct investment was mostly from capital-intensive, so that it could not elevate the unemployment and could not increase the purchasing power of the Indonesian people. The purposes of this research was to examine and analyze the inflation factors (caused by both the aggregate demand and cost pressures of national production) against the foreign direct investment and unemployment and their impact on the people's purchasing power in Indonesia.

This research used secondary data time series for 32 years since 1982 to 2013. The research method used is explanatory research to explain the causal relationship between the variables in a model, through hypothesis testing. The analysis employed statistical technique of simple and multiple linear regression.

The results of the research showed that these factors of money supply M2, price of fuel, ICOR, interest rate, exchange rate, and the terms of trade are simultaneously and partially effect on inflation. Inflation gives positive effect on foreign direct investment and unemployment.

Furthermore, inflation, foreign direct investment, and unemployment have simultaneously and partially on the people's purchasing power in Indonesia. This research has also found dominant factors which effect inflation (ranked from the most dominant to the lesser): exchange rate, interest rate (cost push inflation), and the price of fuel, money supply M2 (demand pull inflation). And the most dominant factor that influence the people's purchasing power in Indonesia is unemployment.

Keywords: Inflation factors, FDI, unemployment, purchasing power in Indonesia.

PENDAHULUAN

Faktor inflasi merupakan bagian dari masalah makro mendapatkan perhatian besar dalam pembangunan ekonomi suatu negara, peran otoritas moneter sangat penting dalam pengawasan dan pengendalian angka inflasi, sebab inflasi yang tinggi secara tidak langsung dapat memperlambat pertumbuhan ekonominya, hal ini akan selalu dihadapi oleh negara-negara yang sedang berkembang, apalagi negara sedang mengalami konflik atau perang, pada akhirnya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakatnya. Inflasi yang timbul baik

akibat aktivitas ekonomi, permintaan agregat atau penawaran agregat harus tetap dikendalikan oleh para pemangku kebijakan dalam sebuah negara. W.I.M. Poli (2010, hal. 254) mengatakan, menurut Friedman pemerintah seharusnya mengandalkan kebijakan moneter bukan hanya kebijakan fiskal, yaitu : mengendalikan uang yang beredar untuk mengatasi inflasi, gejala demo buruh, kesempatan kerja dan pendapatan nasional, artinya jika pemerintah meningkatkan jumlah uang yang beredar yang sama dengan kenaikan pendapatan nasional riil, maka inflasi dapat ditiadakan dan kondisi seperti ini juga tidak

baik, sebaliknya inflasi moderat justru akan menggairahkan iklim investasi.

Goldman Sachs memformulasikan 11 negara yang akan prospektif untuk tujuan investasi, yaitu mengikuti prospek BRIC (Brazil, Rusia, India dan China), mereka merupakan kelompok “*The Next-11*” yang terdiri dari : Bangladesh, Mesir, Indonesia, Iran, Meksiko, Nigeria, Pakistan, Filipina, Korea Selatan, Turki dan Vietnam.

Salah satu indikator makro ekonomi yang menjadi pertimbangan “*growth environment score (GES) Index*” adalah : Inflasi. (Chatib Basri, dkk, 2012, hal. 40).

Di Asean sendiri angka inflasi berfluktuatif di masing-masing negara, berikut ini perbandingan angka inflasi antara Indonesia, Singapura, Malaysia dan Thailand adalah (Asean – 5):

Tabel 1 : Inflasi Negara Asean Tahun 2003-2013

Tahun	Indonesia	Singapura	Malaysia	Thailand
2003	5,06	0,10	0,01	0,56
2004	6,40	1,66	1,52	1,04
2005	17,11	0,10	3,03	1,51
2006	6,60	1,20	3,61	1,53
2007	6,59	2,10	2,03	0,82
2008	11,06	6,51	5,44	1,69
2009	2,78	0,10	0,01	3,50
2010	6,96	1,80	1,00	1,28
2011	3,79	5,24	3,17	1,27
2012	4,30	5,50	3,00	3,60
2013	8,33	2,13	2,76	2,30

Sumber : BI : *Bloomberg* (2013).

Indonesia mengalami inflasi tinggi sebesar 77,63 persen pada tahun 1998, pasca krisis ekonomi yang menimbulkan gejolak sosial (BPS: 2000). Data inflasi Asean sepuluh tahun terakhir menunjukkan, bahwa Indonesia masih memiliki tingkat inflasi lebih tinggi dibandingkan Singapura, Malaysia, Thailand, namun masih pada tahap moderat berkisar antara 5 persen s/d 8 persen, akan berpengaruh terhadap masuknya Investasi Asing Langsung (FDI), dan inflasi tersebut berpengaruh langsung terhadap penurunan daya beli masyarakat di Indonesia.

Indonesia memiliki tingkat inflasi moderat yaitu antara 5 – 8 persen, sehingga masih diminati oleh para investor asing untuk menanamkan modalnya secara langsung (FDI) ke negeri ini. Menurut Undang-undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, definisi PMA pada pasal 1 ayat 6 adalah : perseorangan warga negara asing, badan usaha asing

dan/atau pemerintahan asing yang melakukan penanaman modal di wilayah RI penjelasan ini mengatakan bahwa diberikan kesempatan kepada pihak asing menanamkan modal di Indonesia bisa perseorangan warga negara asing artinya perseorangan asing diizinkan berusaha dibidang penanaman modal asing tetapi wajib dalam bentuk badan usaha Indonesia (PT) berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan. Apabila tidak dalam bentuk badan hukum perseroan, pihak asing tidak diperbolehkan melakukan usahanya di Indonesia.

Indonesia sebagai bagian dari “*The Next-11*” menjadi tempat yang paling menjanjikan dalam hal investasi. Dalam *World Investment Report 2012* yang dikeluarkan oleh UNCTAD (*United Nations Conference on Trade and Development*) menunjukkan, China akan mengungguli Amerika Serikat sebagai negara tujuan investasi asing langsung

(*Foreign Direct Investment/*FDI) hingga tahun 2013. Indonesia akan mengungguli Australia dan Jerman pada periode yang sama. (Chatib Basri, dkk. 2012, hal 41).

Inflasi moderat tidak menjadikan masalah para pemodal asing untuk menanamkan modalnya (FDI) di Indonesia, terutama menjelang berlakunya Ekonomi Masyarakat Asean (AEC 2015), setiap negara anggota akan meningkatkan daya saingnya dan menjaga inflasi tetap rendah untuk menarik FDI negara lain. Hal ini ditegaskan Badan Standardisasi Perdagangan, Kementerian Perdagangan Indonesia 2013 dihadiri delegasi Asean, pada seminar nasional dengan tema “Indonesia Menuju Masyarakat Ekonomi Asean : Meningkatkan Daya saing Dalam Pasar Bersama Asean” menekankan perlunya efisiensi dan meningkatkan ekspor, sehingga Indonesia diharapkan menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Fakta dilapangan kenyataannya peningkatan Investasi Asing Langsung Indonesia tidak menurunkan jumlah pengangguran terbuka, karena penanaman modal asing tersebut berupa padat modal seperti mesin-mesin otomatis dan pemanfaatan tenaga kerja (*outsourcing*) yang sering diprotes oleh Serikat Pekerja sepuluh tahun terakhir ini. Penyebab lainnya beralihnya pekerja tetap yang terkena PHK akibat otomatisasi, beralih profesi dari buruh menjadi PKL (Pedagang Kaki Lima) yang pada saat sekarang tidak terdaftar lagi menjadi tenaga kerja di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI.

Jenis inflasi yang timbul karena penawaran agregat, diikuti biaya produksi tinggi disebabkan kenaikan suku bunga kredit oleh BI, dan kenaikan nilai tukar Kurs rupiah terhadap dolar AS, mengakibatkan kuantitas produksi menurun, dan mendorong naiknya harga-harga barang di pasar, keadaan ini menyebabkan *cost push inflation*.

Di Indonesia inflasi terus dikendalikan dan dipertahankan dibawah

angka psikologis 10 persen, untuk meningkatkan daya beli masyarakat yang semakin menurun pertumbuhannya, hal ini tercermin dari menurunnya persentasi perubahan PDB terhadap jumlah penduduk Indonesia beberapa tahun terakhir ini.

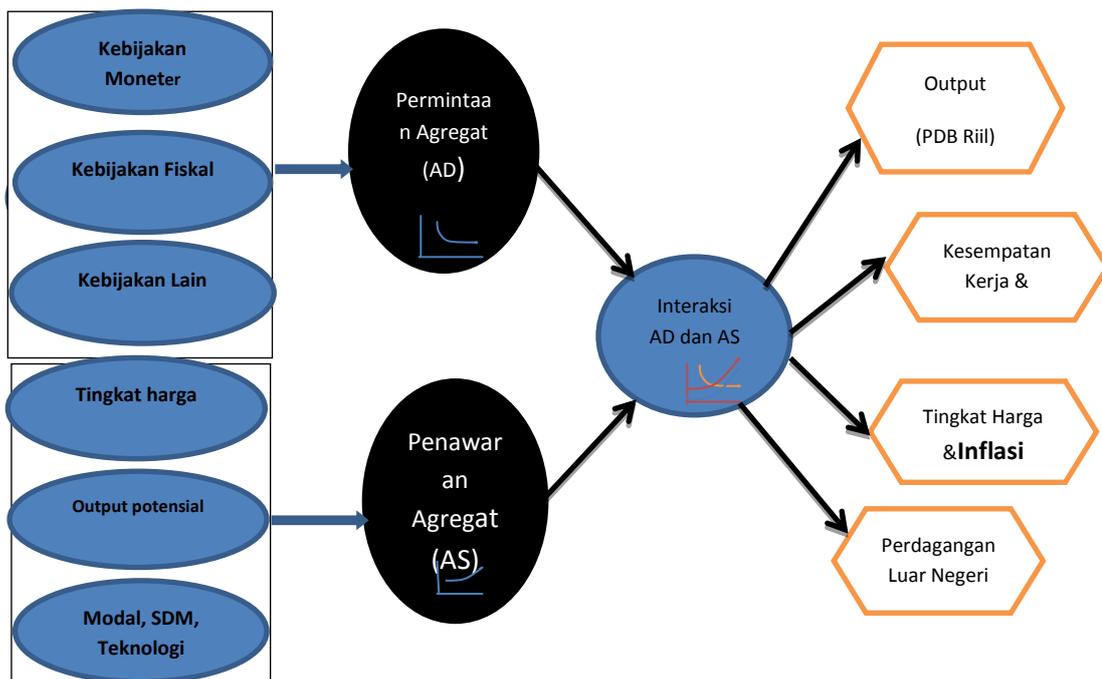
Selanjutnya masalah-masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaruh faktor-faktor : Jumlah Uang beredar M2, Harga BBM, ICOR, Suku Bunga Kredit, Kurs dan *Terms of Trade* secara simultan dan parsial terhadap Inflasi di Indonesia?
2. Bagaimanakah pengaruh Inflasi terhadap Investasi Asing Langsung di Indonesia?
3. Bagaimanakah pengaruh Inflasi terhadap Pengangguran di Indonesia?
4. Bagaimanakah pengaruh Inflasi, Investasi Asing Langsung, dan Pengangguran secara simultan dan parsial terhadap Daya beli masyarakat di Indonesia?

BAHAN DAN METODE

Teori Inflasi

Pengertian inflasi merupakan bagian dari ilmu ekonomi makro akibat dari interaksi antara permintaan agregat (*aggregate demand*) yang terdiri dari jumlah total bersedia dibelanjakan untuk pengeluaran konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah yang sangat tergantung pada kebijakan moneter, kebijakan fiskal dan lain-lain, dan penawaran agregat (*aggregate supply*) yang mengacu kepada total kuantitas barang dan jasa yang dihasilkan oleh dunia bisnis suatu negara dan dijual pada periode tertentu, dan sangat tergantung dari tingkat harga, kapasitas produktif perekonomian dan tingkat biaya. (Samuelson dan Nordhaus : 2004, hal. 87). Interaksi tersebut digambarkan mereka sebagai suatu skema mulai dari permintaan agregat dan penawaran agregat hingga interaksi mencapai titik keseimbangan tertentu digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1. Penawaran dan permintaan agregat menentukan variabel Makro yang utama

Inflasi terjadi ketika tingkat harga umum naik. Saat ini kita menghitung inflasi dengan menggunakan indeks harga rata-rata tertimbang dari ribuan harga produk individual. Indek harga konsumen (*CPI*) mengukur biaya sejumlah pasar dari barang dan jasa tersebut pada tahun dasar tertentu.

Inflasi adalah faktor penting dari fakta kehidupan ekonomi, dan harus diperhatikan dalam *capital budget*. Pada ujian awal inflasi diperhatikan dalam hubungannya dengan suku bunga. (Ross, et. al. 2002, hal. 177).

Jumlah Uang Beredar M2

Jumlah uang beredar merupakan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan inflasi yang sangat erat kaitannya dengan permintaan uang. Setiap negara memiliki kebijakan pengendalian uang beredar untuk menekan laju inflasinya. Teori Fisher, Irving (2006, hal. 160), persamaan kuantitas menurut teori ini adalah jumlah kuantitas uang yang dibutuhkan untuk

bertransaksi, semakin banyak uang yang dipegang, maka kuantitas uang dalam perekonomian suatu negara, erat kaitannya dengan uang yang dipertukarkan untuk transaksi. Persamaan Irving Fisher adalah :

$$M \times V = P \times T$$

M = Money in circulation

V = Velocity of circulation

P = Price

T = Quantity of trade

Harga BBM

Faktor lain yang mempengaruhi inflasi adalah kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), sebab BBM merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia untuk alat transportasi dan kebutuhan lainnya, sehingga setiap kenaikan BBM akan menyebabkan harga-harga barang dan jasa di pasaran akan meningkat, bahkan kenaikannya lebih besar dari kenaikan BBM yang ditentukan oleh pemerintah, hal ini juga dapat terjadi karena adanya faktor kelangkaan cadangan BBM, sehingga

sangat berpengaruh pada permintaan yang mendorong tingginya harga BBM tadi.

Menurut konsep permintaan agregat, yaitu aktivitas ekonomi berkaitan dengan pengeluaran masyarakat, yang sangat ditentukan oleh faktor-faktor pemenuhan konsumsi masyarakat antara lain kebutuhan BBM yang meningkat secara terus menerus. Peningkatan aktivitas ekonomi di masyarakat yang tidak seimbang, maka akan mendorong budaya konsumtif di masyarakat. Pertumbuhan PDB Indonesia apabila dicermati saat ini didorong oleh konsumsi tinggi, sementara kegiatan produktif di masyarakat justru menurun. Contoh budaya konsumtif antara lain penggunaan BBM bersubsidi secara nasional sulit di kendalikan, menyebabkan dampak makro ekonomi negatif. (Henry Faizal Noor, 2013, hal. 232).

Pasca krisis keuangan yang diawali dari jatuhnya mata uang bath di Thailand tahun 1997, Indonesia terimbas krisis keuangan, hingga akhirnya menjadi pasien IMF. Pada bulan April 1998 Indonesia dan IMF menyepakati 50 butir LoI dan memorandum "Kebijakan Ekonomi Keuangan" diantaranya penghapusan subsidi BBM secara bertahap. Kenaikan harga BBM di pasar internasional dari 45 dolar AS per barel diawal tahun 2005 menjadi 70 dolar per barel sangat tidak menguntungkan Indonesia. Indonesia walaupun sebagai anggota negara-negara pengekspor minyak (OPEC) namun tercatat sebagai negara pengimpor BBM terbesar di Asia, jauh melebihi Jepang yang bukan penghasil minyak mentah. Dengan demikian meningkatnya harga BBM sebagai pencabutan bertahap subsidi pemerintah yang sudah mengalami defisit APBN, akan menimbulkan inflasi. Tulus Tambunan (2012, hal.34).

ICOR

Komite Ekonomi Nasional / KEN (2012, hal.3), ICOR merupakan kebutuhan investasi terhadap peningkatan 1 persen produk domestik bruto (PDB). Artinya, bila $ICOR = 5,3$ persen maka untuk meningkatkan PDB sebesar 1 persen membutuhkan investasi sebanyak 5,3 persen dari PDB. Berdasarkan perhitungan yang pernah dibuat oleh KEN, ICOR Indonesia rata-rata di bawah 5 persen sejak 2004 sampai 2008. Namun sejak 2009 sampai 2012, ICOR Indonesia rata-rata berada di atas 5 persen.

ICOR kepanjangan dari *Incremental Capital Output Ratio*, adalah perbandingan Investasi dibagi PDB terhadap pertumbuhan ekonomi (BPS : 2010).

$$ICOR = \frac{\text{Investasi} / \text{PDB}}{\Delta \text{PDB}} = \frac{I/Y}{\Delta Y/Y}$$

ICOR, merupakan dana yang dibutuhkan pada pelaksanaan investasi, maka perlu pengawasan agar pelaksanaan investasi bisa berjalan dengan baik dan tepat pada waktunya. Buruknya infrastruktur yang menunjang investasi, kurang baiknya birokrasi sehingga biaya perijinan menjadi mahal, banyaknya korupsi serta waktu penyelesaian pengerjaan proyek menjadi lama, dan apabila tidak ada tambahan investasi, berarti proyek terhenti maka inflasi akan meningkat. Hal ini menyebabkan biaya tinggi, dan merugikan masyarakat penikmat fasilitas umum, seperti tertundanya pembangunan BKT, Monorail, Hambalang dan lain-lain.

ICOR semakin besar, maka dana investasi untuk membiayai proyek pembangunan misalnya jalan tol, fasilitas publik makin besar dan meningkatkan inflasi, maka hal ini membuat produktivitas menurun, dan banyak biaya serta uang

terbuang karena molor waktunya, ketika inflasi tinggi diatas moderat, maka perekonomian akan terhambat.

Menurut Yuyun Wirasasmita (2012, hal. 5), Apabila ICOR meningkat, maka pertumbuhan ekonomi menurun, karena terjadi kebocoran sehingga harga-harga menjadi mahal dan tidak efisien, maka inflasi meningkat. Oleh sebab itu dalam penyelesaian belanja investasi (*aggregate demand*) untuk mencapai pertumbuhan PDB tertentu, penyediaan dana untuk investasi perlu dikontrol dan dievaluasi. Apabila ICOR meningkat, investasi menjadi tidak efisien terjadi pemborosan, maka menimbulkan kenaikan inflasi.

Suku Bunga Kredit

Pengertian suku bunga kredit adalah suku bunga pinjaman yang di keluarkan oleh BI kepada para pelaku usaha. Tingkat bunga pinjaman yang semakin rendah, maka akan meningkatkan aktivitas produksi, sebaliknya semakin meningkatnya suku bunga kredit, maka biaya akan meningkat dan output berkurang akan mendorong kenaikan harga di pasaran. Tingkat bunga pinjaman ini dapat digunakan sebagai instrumen atau alat kebijakan untuk mengatur jumlah dan arah investasi, sekaligus bagi pemerintah sebagai pengawasan inflasi. Sektor-sektor yang dianggap strategis dapat didorong perkembangannya melalui investasi dengan menggunakan kredit prioritas dengan suku bunga yang rendah, bilamana perlu dapat diberikan subsidi oleh pemerintah. Di Indonesia kredit prioritas diberikan kepada pengusaha atau pedagang ekonomi lemah dapat berupa kredit investasi kecil (KIK), kredit modal kerja permanen (KMKP), dan beberapa perusahaan PMDN. Bunga yang dikenakan lebih kecil dari bunga kredit umum. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi, dalam rangka menyejahterakan

masyarakat melalui pemerataan pendapatan (Eddy Soegiarto dan Mardyono. 2011, hal. 100).

Tingkat bunga nominal, tingkat seseorang menukarkan uang sekarang dengan uang masa depan adalah tingkat bunga nominal, yang biasa disebut suku bunga. Demikian pula suku bunga ini akan menentukan tingkat bunga pinjaman, yang memiliki selisih 4-5 persen dari suku bunga nominal, sayangnya inflasi hampir pasti melekat dengan suku bunga, dan besarnya sulit untuk diramalkan. (William F, Sharpe, et.al. : 1997, hal. 118). Kredit diperlukan untuk penambahan modal kerja sehingga biaya bunga yang timbul selalu dikelola agar lebih kecil dari penghasilan yang diterima oleh para pelaku usaha. Pengelolaan yang efisien dapat menjaga stabilitas harga barang yang dijual di pasaran, baik pasar domestik maupun pasar ekspor.

Kurs

Kurs adalah sistem pembayaran internasional, yang dinyatakan dalam bentuk nilai tukar mata uang satu negara dengan mata uang negara lainnya yang melakukan transaksi perdagangan internasional. Salah satu faktor yang mempengaruhi inflasi adalah nilai tukar uang suatu negara, apabila nilai tukar negara pengimpor bahan mentah dan barang modal produksi merosot, maka yang terjadi adalah defisit perdagangan dan menimbulkan biaya tinggi karena tidak efisien serta mendorong harga pokok produksi meningkat, akibatnya kuantitas produksi menurun dan menimbulkan harga jual barang di pasaran meningkat.

a. Menurut Masngudi (2012, hal.2), sistem kurs devisa, dimana dibedakan kurs devisa tetap (*fixed change rate*) dan kurs devisa mengambang (*floating exchange rate*). Sistem Kurs devisa tetap : Bila satu rupiah emas

berisikan satu gram emas, dan satu yen emas berisikan dua gram emas, maka kurs devisa kedua mata uang tersebut adalah Rp. 2,- = Yen 1. Kurs tidak akan berubah selama kadar nilai emas masing-masing mata uang dalam sistem pertukarannya tidak mengalami perubahan.

- b. Sistem Kurs devisa mengambang : Terjadi bilamana kurs suatu mata uang dengan mata uang lain dibiarkan untuk ditentukan secara bebas oleh tarik menarik kekuatan pasar. Keunggulannya yaitu tidak ada pasar gelap, karena selalu sama dalam setiap keseimbangannya. Namun untuk negara berkembang akan mengakibatkan meningkatnya harga-harga di dalam negeri dan menimbulkan inflasi.

Konsep penawaran agregat, yaitu aktivitas ekonomi berkaitan dengan kegiatan total produksi negara yang sangat ditentukan oleh faktor-faktor produksi. Pergeseran penawaran output yang meningkat atau menurun disebabkan efisien atau tidaknya harga input bahan mentah untuk proses produksi antara lain, bahan mentah, harga barang modal seperti mesin-mesin, biaya-biaya ini di Indonesia sekarang ditentukan oleh kurs nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, sebagai penunjang jalannya proses produksi. (Sadono Sukirno : 2012, hal.248)

Terms of Trade

Pengertian *Terms of Trade* (TOT), adalah rasio harga barang ekspor dan harga barang impor, asumsi barang yang diperdagangkan hanya dua jenis. Dan apabila perdagangan ini hanya dilakukan oleh dua negara maka mitra dagang tersebut akan merupakan satu-satunya pengimpor dari barang yang diekspor negara tersebut.

Terms of Trade merupakan dasar tukar antara ekspor dan impor, sangat penting dibicarakan dalam perdagangan internasional.

Nopirin (2012, hal. 71), dasar tukar ini mempengaruhi tingkat kesejahteraan suatu bangsa dan sekaligus sebagai alat ukur posisi perdagangan luar negeri suatu bangsa.

Beberapa konsep tentang *Terms of trade* :

Net Barter Terms of trade

Merupakan rasio antara indeks harga ekspor (Px) dan indeks harga impor (Pm). Maka rumusan *Net barter terms of trade* adalah :

$$N = \frac{P(x)}{P(m)} \times 100$$

Semakin besar nilai ekpornya maka semakin baik *terms of trade* nya, berarti negara pengekspor makin sejahtera bangsanya.

Investasi Asing Langsung

Investasi adalah penanaman modal berupa pembelanjaan barang-barang modal dan perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa dalam perekonomian. Investasi atau pembentukan modal merupakan komponen permintaan agregat dalam aktivitas makro ekonomi.

Henry Faizal Noor, (2013, hal. 37), berpendapat bahwa aspek-aspek investasi menurut jenisnya adalah :

- a. Investasi langsung (*direct investment*) : investasi pada faktor produksi yang menghasilkan aneka barang, dan jasa untuk keperluan konsumsi masyarakat atau disebut investasi pada sektor riil.
- b. Investasi tidak langsung (*indirect investment*) : investasi bukan pada

faktor produksi, tetapi pada sektor keuangan (*financial investment*) seperti deposito, saham, obligasi dan sejenisnya yang menghasilkan jasa keuangan, termasuk SUN, baik yang konvensional maupun syariah (sukuk) dan investasi pada surat berharga lainnya.

Menurut kepemilikan penanaman modal di Indonesia ada dua macam :

- a. PMA (investornya orang asing dalam bentuk Badan Usaha).
- b. PMDN (investornya adalah WNI baik bentuk perorangan maupun badan usaha).

Investasi asing langsung menurut teori ini, adalah pemindahan aliran dana dari kepemilikan orang asing yang masuk ke negara tujuan investasi dan beroperasi di sektor riilnya dalam suatu aktivitas ekonomi yang berupa kegiatan produksi nasional.

Pendapat Krugman, Paul (2004, hal. 214), yang dimaksud Penanaman Modal Asing Langsung (*foreign direct investment*) / FDI adalah suatu arus modal internasional dimana perusahaan dari suatu negara mendirikan atau memperluas operasi atau jaringan bisnisnya di negara-negara lain. Ciri yang menonjol dari FDI ini adalah melibatkan bukan hanya sumber daya, tetapi juga memberlakukan pengendalian asing (pemilik modal itu). Cabang ataupun anak perusahaan tidak hanya diikat dengan kewajiban finansial kepada induk perusahaannya, akan tetapi secara keseluruhan ia adalah bagian integral dari struktur organisasi perusahaan induk, sehingga cabang atau anak perusahaan ini merupakan perpanjangan tangan dari perusahaan induk yang berada di negara asalnya, dan segala keputusan puncak diambil dari pusat.

Pengangguran

Dornbusch, Rudiger & Ficher, Stanley (1984, hal.486), permasalahan pengangguran tidak terlepas dari pengaruh inflasi. Munculnya kebijakan bank sentral seperti di Amerika Serikat tentang pengawasan inflasi yang dibarengi penerapan kebijakan uang ketat terhadap angka pengangguran, dengan segala konsekuensinya, bahwa pelaksanaan peraturan kebijakan uang ketat untuk pemberantasan inflasi dampaknya kepada munculnya bentuk-bentuk pengangguran.

Beberapa tujuan para pembuat kebijakan ekonomi adalah mencapai tingkat inflasi yang rendah dan pengangguran juga rendah, namun demikian pada kenyataannya kedua tujuan tersebut berlawanan arah, saling bertentangan. Mankiw, Gregory (2007, hal. 375).

Sebagai ilustrasi ketika para pembuat kebijakan ekonomi memperbesar permintaan agregat, kebijakan ini akan menggerakkan perekonomian sepanjang kurva penawaran agregat jangka pendek ke titik output yang tinggi dan tentu pada tingkat harga yang tinggi pula. Output yang lebih tinggi menunjukkan pengangguran lebih rendah. Sebaliknya tingkat harga meningkat dibanding periode atau tahun sebelumnya, artinya inflasi lebih tinggi.

Para pembuat kebijakan pada jangka pendek akan melihat pertumbuhan ekonomi meningkat sepanjang kurva penawaran agregat, pengangguran akan menurun dan inflasi meningkat. Sebaliknya bila mereka mengontraksi permintaan agregat dan memperlambat perekonomian kebawah sepanjang kurva penawaran agregat kebawah, maka pengangguran akan meningkat dan inflasi menurun. *Trade-off* inflasi dan pengangguran ini disebut *kurva Philips*.

Kurva Philips, menerangkan sebagai refleksi dari kurva penawaran agregat

(*aggregate supply*) jangka pendek, artinya ketika para pembuat kebijakan ekonomi menggerakkan perekonomian sepanjang kurva penawaran agregat jangka pendek, maka inflasi akan bergerak bersamaan pengangguran pada posisi berlawanan. Kurva Philips (*Philips curve*), menjelaskan bahwa tingkat inflasi dipengaruhi oleh :

- Inflasi yang diharapkan
- Pengangguran tingkat siklis
- Peningkatan penawaran

Daya beli masyarakat

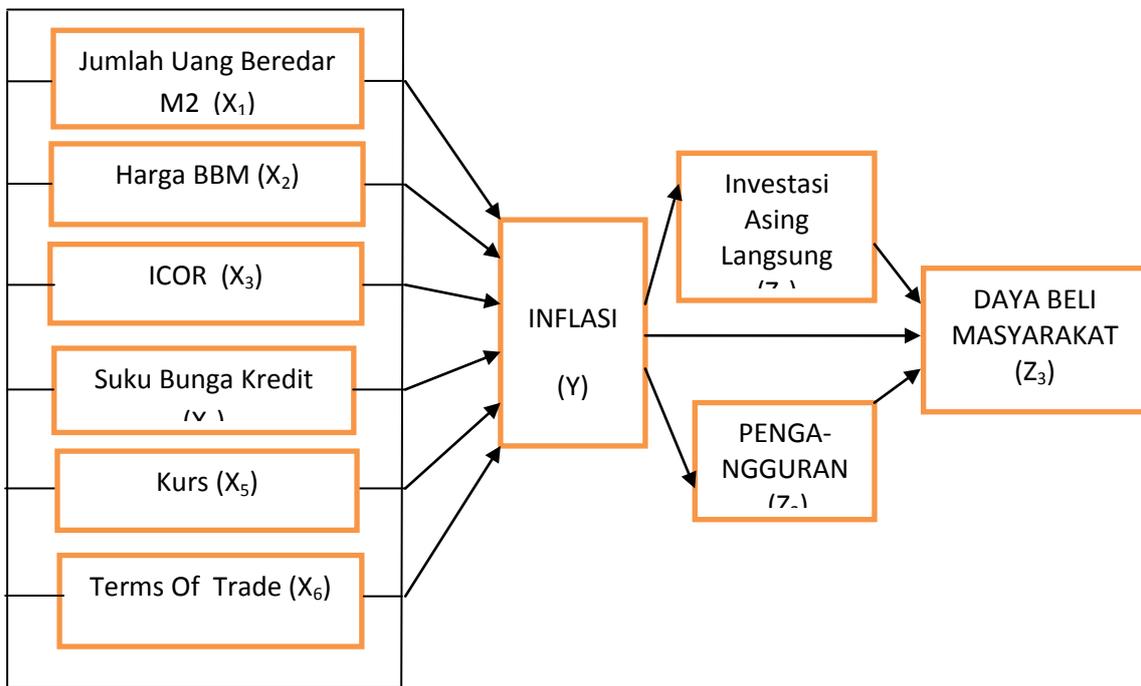
Teori ini membahas masalah daya beli masyarakat (*purchasing power*) merupakan kekuatan dan kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang dan jasa yang dibutuhkan pada harga dan waktu tertentu.

Sadono Sukirno (2007, hal. 56), apabila membandingkan tingkat kesejahteraan masyarakat di beberapa

negara berdasarkan tingkat pendapatan perkapitanya, maka secara sadar atau tidak sebenarnya khalayak menganggap bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat dicerminkan dari pendapatan per kapita masyarakat tersebut.

Kerangka Pemikiran.

Berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu yang relevan, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini bermula dari pendekatan teori Inflasi yang merupakan bagian dari Ekonomi Makro tentang kebijakan moneter dari otoritas suatu negara, guna menciptakan stabilitas ekonomi. Pada akhirnya dapat meningkatkan Investasi Asing Langsung serta memberikan kesejahteraan masyarakat dalam bentuk menguatnya Daya beli masyarakat.



Gambar 2. Kerangka Pemikiran

*) Dr. Fransisca Sestri ; Alumni Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Borobudur.
Email : sestri.rahardjo@gmail.com.

Hipotesis Penelitian

1. Jumlah uang beredar M2, Harga BBM, ICOR, Suku Bunga Kredit, Kurs, *Terms of Trade* berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap Inflasi di Indonesia.
2. Inflasi berpengaruh positif terhadap Investasi Asing Langsung di Indonesia
3. Inflasi berpengaruh negatif terhadap Pengangguran di Indonesia
4. Inflasi, Investasi Asing Langsung, dan Pengangguran berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap Daya Beli Masyarakat di Indonesia

Definisi Operasional Variabel

1. Jumlah uang beredar M2 (X_1)
Adalah variabel jumlah uang beredar M2 diberikan lambang (X_1), uang beredar dalam bentuk uang kartal dan uang giral ditambah simpanan dan deposito berjangka atau disebut M2 (Fisher, Irving: 2006, dan Boediono : 2012).
2. Harga BBM (X_2)
Adalah variabel harga BBM jenis premium bersubsidi, yang diberikan lambang (X_2), merupakan harga jenis bahan bakar yang digunakan seluruh masyarakat di Indonesia, yang ditentukan besarnya oleh Pemerintah Pusat (Kadin Indonesia: 2013).
3. ICOR (X_3)
Adalah variabel ICOR yang diberi lambang (X_3), kepanjangan dari *incremental capital output ratio* merupakan kebutuhan investasi terhadap peningkatan 1% Produk Domestik Bruto (KEN : 2012)
4. Suku Bunga Kredit (X_4)
Adalah variabel suku bunga kredit yang diberi lambang (X_4), bunga pinjaman merupakan salah satu bagian terpenting dari makro ekonomi (Mankiw, Gregory : 2007).
5. Kurs(X_5)

Adalah variabel Kurs yang diberi lambang (X_5), nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar AS, sebagai alat pertukaran dalam perdagangan internasional (Masngudi : 2012)

6. *Terms Of Trade* (X_6)
Adalah variabel *Terms of Trade* diberi lambang (X_6), merupakan perbandingan antara indeks harga ekspor dan indeks harga impor, pada periode tertentu (Nopirin : 2012).
7. Inflasi (Y)
Adalah variabel Inflasi yang diberi lambang (Y), merupakan indikator makro ditandai kenaikan harga-harga umum barang dan jasa terus menerus pada periode tertentu, dihitung berdasarkan CPI (Samuelson, Nordhaus : 2004).
8. Investasi Asing Langsung (Z_1)
Adalah variabel Investasi Asing Langsung yang diberi lambang (Z_1), merupakan investasi penanaman modal asing yang masuk dari negara lain ke Indonesia melalui perdagangan internasional (Krugman, Paul: 2004).
9. Pengangguran (Z_2)
Adalah variabel Pengangguran terbuka yang diberi lambang (Z_2), merupakan jumlah angkatan kerja di Indonesia yang sudah mencari pekerjaan dan tidak mendapatkan pekerjaan. (Prathama Rahardja dan Mandala Manurung : 2013).
10. Daya Beli Masyarakat (Z_3)
Adalah variabel Daya beli masyarakat yang diberi lambang (Z_3), merupakan pendapatan masyarakat per kapita, yaitu perbandingan antara PDB dengan jumlah penduduk (Sadono Sukirno : 2012).

Teknik Analisis Statistik

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Model Analisis Statistik.

Model analisis eksplanatori yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah statistik inferensial dan analisis regresi.

2. Uji Asumsi Klasik

Dalam uji BLUE asumsi-asumsi yang diuji meliputi :
 Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Heteroskedastisitas, Uji Otokorelasi.

Tabel 2. Perkembangan Faktor-faktor *demand pull inflation* Jumlah Uang Beredar M2, Harga BBM dan ICOR Tahun 2003 - 2013

Tahun	Jumlah Uang Beredar (dalam Milyar)	Pertumbuhan %	Harga BBM	Pertumbuhan %	ICOR	Pertumbuhan %
2003	955.692,00		1.550,00		4,27	
2004	1.033.877,00	8,18%	1.550,00	0,00%	3,90	-8,67%
2005	1.202.763,00	16,34%	4.500,00	190,32%	3,76	-3,59%
2006	1.382.493,00	14,94%	4.500,00	0,00%	4,09	8,78%
2007	1.649.622,00	19,32%	4.500,00	0,00%	3,44	-15,89%
2008	1.895.838,00	14,93%	6.000,00	33,33%	3,74	8,72%
2009	2.141.384,00	12,95%	4.500,00	-25,00%	5,12	36,90%
2010	2.469.399,00	15,32%	4.500,00	0,00%	3,76	-26,56%
2011	2.877.220,00	16,51%	4.500,00	0,00%	3,68	-2,13%
2012	3.205.129,00	11,40%	4.500,00	0,00%	3,92	6,52%
Sep.2013	3.584.017,00	11,82%	6.500,00	44,44%	5,80	47,96%
Rata-rata	2.036.130,36	14,17%	4.281,82	24,31%	4,13	5,20%
Pertumbuhan						

Sumber : BI 2013, Bappenas 2013 (diolah)

Jumlah Uang Beredar (M2).

Faktor jumlah uang beredar adalah semua uang kartal dan uang giral ditambah deposito berjangka dan simpanan tabungan lainnya, mempengaruhi inflasi secara dominan, 10 tahun terakhir, pada tahun 2005 ketika harga-harga barang dan jasa meningkat pada tahun tersebut jumlah uang beredar meningkat secara signifikan sebesar 16,34 % dari jumlah Rp. 1.033.877,00 milyar menjadi Rp. Rp. 1.202.763,00 milyar, sehingga menimbulkan inflasi meningkat sebesar 167,34 % dari angka inflasi 6,40 % menjadi 17,11 % yang membuat masyarakat semakin kesulitan ekonomi. Namun demikian karena rupiah semakin merosot terhadap mata uang asing khususnya dolar AS sejak tahun 2008,

seiring krisis Amerika dan harga minyak dunia meningkat, maka uang beredar M2 banyak disimpan dalam bentuk valuta asing, sehingga uang beredar M2 meningkat Inflasi menurun, data tahun 2011 jumlah uang beredar M2 meningkat 16,51 % dari Rp. 2.469.399,00 menjadi Rp. 2.877.220,00 sedangkan Inflasi menurun sebesar – 45,55 % dari 6,96 % menjadi 3,79 %. Menurut Tulus Tambunan (2012, hal. 278). Jumlah M2 tiga dekade mulai didominir oleh uang quasi, pada tahun 2000 bahwa M2 jumlahnya hampir Rp. 2.000 triliun, berupa uang quasi sebesar Rp. 585 triliun. Pada tahun 2008 uang quasi meningkat menjadi Rp. 1.400 triliun. Sehingga hubungan antara Uang beredar M2 dan Inflasi memiliki slope negatif merupakan temuan baru.

Tabel 3. Pertumbuhan Uang Quasi terhadap M2 Tahun 1989 - 2013

Tahun	M1	Uang Quasi	Pertumbuhan Uang Quasi	Jumlah M2	% Uang Quasi ke M2
1989	20.114	38.590	#REF!	58.704	65,74%
1990	23.819	60.811	58%	84.630	71,86%
1991	26.342	72.717	20%	99.059	73,41%
1992	28.779	90.274	24%	119.053	75,83%
1993	37.202	108.397	20%	145.599	74,45%
1994	46.374	129.138	19%	175.512	73,58%
1995	53.551	169.961	32%	223.512	76,04%
1996	64.088	224.543	32%	288.631	77,80%
1997	78.343	277.300	23%	355.643	77,97%
1998	101.197	476.184	72%	577.381	82,47%
1999	225.633	521.572	10%	747.205	69,80%
2000	162.230	584.842	12%	747.072	78,28%
2001	177.730	666.322	14%	844.052	78,94%
2002	191.934	691.969	4%	883.903	78,29%
2003	225.110	728.788	5%	955.692	76,26%
2004	245.946	785.261	8%	1.033.877	75,95%
2005	271.140	929.343	18%	1.202.763	77,27%
2006	347.013	1.032.865	11%	1.382.493	74,71%
2007	450.056	1.196.119	16%	1.649.622	72,51%
2008	456.787	1.435.772	20%	1.895.838	75,73%
2009	515.825	1.622.055	13%	2.141.388	75,75%
2010	603.604	1.856.720	14%	2.469.399	75,19%
2011	722.992	2.139.840	15%	2.877.220	74,37%
2012	742.206	2.452.503	15%	3.205.129	76,52%
Sep-13	867.722	2.691.903	10%	3.584.017	75,10%

Sumber : BI 2013 (diolah)

Sejak tahun 1998 uang beredar M2 didominasi oleh uang quasi sebesar 82,47 persen dimana masyarakat ikut menentukan simpanan baik berupa deposito rupiah maupun dalam mata uang asing. Pasca reformasi hingga 11 tahun terakhir Jumlah Uang Beredar M2 telah didominasi oleh uang quasi rata-rata 72 persen sampai dengan 75 persen. Sehingga uang yang

beredar dan dipegang masyarakat hanya 25 persen cenderung menurun dari total M2, tetapi inflasi meningkat terus tiga tahun terakhir sejak tahun 2011 hingga 2013.

Harga BBM

Harga BBM jenis premium digunakan oleh seluruh masyarakat karena masih disubsidi pemerintah. Menurut Tulus

Tambunan (2012, hal. 235) bahwa pada tahun 2009 jumlah subsidi untuk energi (meliputi BBM dan subsidi listrik) dan non energi (subsidi pangan, pupuk, minyak goreng dll) sebesar Rp.166,70 triliun, atau kurang lebih mencapai 23,30 persen dari jumlah belanja negara. Sehingga setiap pencabutan subsidi akan diikuti oleh kenaikan barang-barang dan jasa yang mendorong inflasi.

Pada tahun 2005 saat pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM jenis premium dari Rp. 1.550,00 per liter menjadi Rp. 4.500,00 per liter, meningkat sebesar 190,32 % maka harga-harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus meningkat hampir dua kali lipat pada tahun tersebut. Maka inflasi meningkat sebesar 167,34 % dari 6,40 % menjadi 17,11 % terbesar sepanjang sejarah setelah krisis ekonomi tahun 1998. Namun demikian pada tahun 2009, ketika pemerintah mengumumkan penurunan harga BBM jenis premium sebesar 25,00 % dari Rp. 6.000,00 per liter menjadi Rp. 4.500,00 per liter, inflasi menurun sebesar 74,86 % dari 11,06 % menjadi 2,78 %. Namun demikian harga-harga barang dan jasa yang sudah mencapai keseimbangan pada saat itu tidak serta merta turun, namun akan stabil di harga tertentu pada saat itu.

ICOR

ICOR merupakan perbandingan antara investasi dan pertumbuhan ekonomi, ketika makin besar ICOR maka inflasi akan meningkat, karena adanya investai

ambahan untuk menjalankan proyek yang tadinya mandeg karena banyak penyimpangan atau korupsi.

Menurut Tulus Tambunan (2012, hal. 45), ICOR (*incremental capital output ratio*), yaitu tambahan stock kapital terhadap tambahan output, dan formulasinya menjadi $(I/I) = \Delta(I/ICOR) s$
 $s =$ Hasrat menabung bagian proporsional dari Pendapatan nasional
 $s = S/Y$. Maka pada saat tertentu agar ICOR harus diperkecil untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebaliknya Inflasi akan meningkat.

Dari tabel dapat dianalisis, pada tahun 2005 ICOR menurun sebesar 3,59 % dari 3,90 % menjadi 3,76 % maka Inflasi meningkat sebesar 167 % dari 6,40 % menjadi 17,11 %. Pada tahun 2010 ICOR menurun sebesar 26,56 % dari 5,12 % menjadi 3,76 % sehingga perlu adanya dana untuk investasi, maka Inflasi meningkat sebesar 150,36 % dari 2,78 % menjadi 6,96 %.

Di Indonesia peran KPK selama 11 tahun terakhir sangat positif sehingga inflasi yang meningkat pada skala moderat dibawah 10 %, diikuti oleh penurunan ICOR karena kebocoran-kebocoran dan korupsi bisa ditekan, dan bersamaan dibarengi *aggregate supply* seperti peningkatan produksi non migas, sehingga pertumbuhan ekonomi meningkat. Temuan baru bahwa ICOR menurun dan inflasi meningkat dalam skala moderat.

Tabel 4. Perkembangan Faktor-faktor *cost push inflation* Suku Bunga Kredit, Kurs dan *Terms of Trade* Tahun 2003 - 2013

Tahun	Suku Bunga Kredit (%)	Pertumbuhan (Persentase)	Kurs (Rp.)	Pertumbuhan (Persentase)	Terms of trade (%)	Pertumbuhan (Persentase)
2003	16,94	-	8.465,00	-	139,79	-
2004	14,12	-16,65%	9.290,00	9,75%	125,30	-10,37%

2005	14,50	2,69%	9.830,00	5,81%	124,06	-0,99%
2006	15,98	10,21%	9.020,00	-8,24%	125,00	0,76%
2007	13,86	-13,27%	9.419,00	4,42%	124,40	-0,48%
2008	13,60	-1,88%	10.950,00	16,25%	123,87	-0,43%
2009	14,50	6,62%	9.400,00	-14,16%	131,58	6,22%
2010	13,25	-8,62%	8.991,00	-4,35%	129,25	-1,77%
2011	12,40	-6,42%	9.068,00	0,86%	129,60	0,27%
2012	11,70	-5,65%	9.400,00	3,66%	123,96	-4,35%
2013	11,86	1,37%	11.977,00	27,41%	129,12	4,16%
Rata-rata Pertumbuhan	13,88		9.619,09		127,81	

Sumber : BI 2013, Bappenas 2013 (diolah).

Suku Bunga Kredit.

Sebagai sarana untuk meningkatkan usaha tentunya industri membutuhkan modal, dan pinjaman Bank adalah pendukung untuk pembiayaan operasional. Setiap kenaikan suku bunga kredit kepada industri, maka akan dibebankan kepada harga barang dan jasa yang dihasilkan. Maka harga pokok produksi akan naik dan menekan kuantitas produksi atau output mengecil, akibatnya harga barang yang diedarkan akan meningkat dan menimbulkan inflasi.

Suku bunga kredit di Indonesia masih cukup mahal dibandingkan negara Asean seperti Malaysia 7,02 persen/pa dan Thailand 9,86 persen/pa, di Indonesia selama sepuluh tahun terakhir berkisar pada angka 13,88 persen dan terakhir pada tahun 2013 sebesar 11,86 persen, hal ini menunjukkan masih mahal biaya bank untuk investasi di Indonesia dan potensi inflasi lebih tinggi dari negara Asean lainnya.

Pada tahun 2005, suku bunga kredit meningkat sebesar 2,69 % dari 14,12 % menjadi 14,50 %, Inflasi meningkat sebesar 167,34 % dari 6,40 % menjadi 17,11 %.

Pada tahun 2011, suku bunga kredit menurun 6,42 % dari 13,25 % menjadi 12,40 %, dan Inflasi menurun juga sebesar 45,55 % dari angka 6,96 menjadi 3,79.

Pada tahun 2013 suku bunga kredit meningkat sebesar 1,37 % dari 11,70 % menjadi 11,86 %, Inflasi meningkat sebesar 93,72 % dari 4,30 % menjadi 8,33 %. Hal ini menjadi sensitif ketika angka inflasi sepanjang tahun 2013 merangkak naik akibat kenaikan BBM dan kelangkaan bahan makanan.

Kurs

Tulus Tambunan (2012, hal. 73) Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menjadi acuan alat pembayaran transaksi perdagangan internasional, sehingga harga dolar pada saat rupiah merosot akan ditentukan oleh permintaan dan penawaran mata uang yang diperdagangkan tersebut. Suatu perubahan kurs dari sebuah mata uang, misalnya rupiah terhadap dolar AS dianggap krisis apabila kurs dari mata uang tersebut mengalami penurunan mendadak atau berlangsung terus menerus maka dampak langsung adalah pada kegiatan ekspor

impor. Jika perusahaan tersebut sebagai pengimpor, seperti Indonesia maka kenaikan kurs dolar AS akan menaikkan biaya produksi dan menimbulkan kenaikan harga jual dipasaran dan mendorong inflasi.

Hal ini juga terjadi di Kanada misalnya. *The market price of foreign exchange in terms of Canadian dollars is called exchange rate. As is the case with other prices, it is determined by supply and demand* (McMillan 1983, hal.201).

Di Indonesia pada tahun 2005 : Kurs naik sebesar 5,81 % dari USD 1 = Rp. 9.290,- menjadi USD 1 = Rp. 9.830,-, Inflasi meningkat sebesar 167,34 % dari 6,40 % menjadi 17,11 %.

Pada tahun 2008 : Kurs naik sebesar 16,25 % dari USD 1 = Rp. 9.419,- menjadi USD1 = Rp. 10.950,- dan Inflasi meningkat sebesar 67,83% dari angka 6,59 % menjadi 11,06 %. Pada tahun 2013: Kurs naik sebesar 27,41 % dari USD 1 = Rp. 9.400,- menjadi USD 1 = Rp. 11.977,- dan Inflasi meningkat sebesar 93,72 % dari angka 4,30 % menjadi 8,33 %. Faktor kenaikan kurs paling besar mempengaruhi kenaikan inflasi di Indonesia.

Terms of Trade (TOT)

Terms of Trade merupakan ukuran dari nilai ekspor dengan impor suatu negara yang melakukan perdagangan internasional. Pada saat krisis global 2008-2009 yang berbeda dengan krisis ekonomi 1998, maka ekspor yang merupakan jalur transmisi yang memiliki dampak bagi kebanyakan negara, termasuk Indonesia terutama negara-negara yang berorientasi ekspor. Secara teori krisis global menimpa industri

yang padat karya dan orientasi ekspor, sehingga produksi menurun harga menjadi tidak kompetitif, kesempatan kerja terancam, maka *terms of trade* akan menurun juga. (Tulus Tambunan : 2012, hal. 97).

Berdasarkan tabel 6, pada tahun 2008 pada saat krisis global Amerika Serikat: TOT menurun sebesar 0,43 % dari 125 % menjadi 124,40 %, dan Inflasi meningkat sebesar 67,83 % dari angka 6,59 % menjadi 11,06 %. Pada saat krisis Eropa pada tahun 2010 : TOT menurun sebesar 1,77 % dari 131,58 % menjadi 129,25 % dan Inflasi meningkat tajam sebesar 150,36 % dari 2,78 % menjadi 6,96 % . Pada tahun 2012 ketika neraca pembayaran migas defisit karena impor melonjak, maka TOT menurun sebesar 4,35 % tertinggi dalam 10 tahun terakhir, dan Inflasi meningkat sebesar 13,46 % dari 3,79 % menjadi 4,30 %.

Investasi Asing Langsung .

Investasi Asing Langsung yang dibidani oleh para MNC ini membuahkan kerjasama Trans Pacific Partnership Agreement (TPP) kelanjutan dari pertemuan Deklarasi APEC di Bogor pada tahun 1998. Dilanjutkan APEC pertemuan pimpinan APEC 2002. Kemudian Amerika Serikat bergabung pada APEC di Yokohama tahun 2009. Kerjasama dan pernyataan bersama Presiden Obama dan PM Jepang Abe pada tahun 2013 tentang TPP diumumkan.

Menurut Hideyuki Miura (2013, hal.11), faktor-faktor dibalik pembentukan integrasi ekonomi regional adalah :

Liberalisasi Perdagangan FDI



Perusahaan Multi Nasional (MNC)



Perdagangan dan FDI



Membentuk Jaringan Produksi Regional



EFISIENSI Produksi

a. Investasi Asing Langsung /FDI di Indonesia dan Asean.

Tabel. 5. Kontribusi Investasi Asing Langsung (FDI) di Indonesia dan Asean Tahun 2003- 2013

(Dalam Miliar USD)

Tahun	Indonesia	Singapura	Malaysia	Thailand	Total
2003	(596,92)	11.941,30	2.473,16	5.232,27	19.049,81
2004	1.896,08	21.026,00	4.624,21	5.860,26	33.406,55
2005	8.336,26	15.459,60	3.966,01	8.055,35	35.817,22
2006	4.914,20	29.347,90	6.076,12	9.454,93	49.793,15
2007	6.928,48	37.032,90	8.590,19	11.326,90	63.878,47
2008	9.318,45	8.588,19	7.375,91	8.538,34	33.820,89
2009	4.877,37	15.278,60	1.387,39	4.853,96	26.397,32
2010	13.770,60	38.638,10	9.167,20	9.678,89	71.254,79
2011	18.159,50	9.599,10	11.700,00	1.576,76	41.035,36
2012	28.472,73	30.030,00	11.920,00	5.159,00	75.581,73
2013	24.145,54	44.500,00	5.875,00	3.300,00	77.820,54
Investasi Kontribusi (%)	22,78%	49,53%	13,86%	13,84%	100%

Sumber : BI 2013, BKPM 2013 (diolah)

FDI Singapura memiliki posisi di urutan pertama, dan menurut World Bank, Singapura memiliki urutan pertama artinya memiliki daya saing tinggi di Asean disusul Malaysia. Berdasarkan data diatas, bahwa kontribusi FDI di Asean selama 10 tahun terakhir adalah sebagai berikut :

~ Singapura memiliki kontribusi sebesar : 49,53 % dengan nilai FDI nya sebesar USD. 261,441.69 miliar.

~ Indonesia memiliki kontribusi sebesar : 22,78 % dengan nilai FDI nya sebesar USD120,222.29 miliar.

~ Malaysia memiliki kontribusi sebesar : 13,86 % dengan nilai FDI nya sebesar USD 73,155.19 miliar.

~ Thailand memiliki kontribusi sebesar : 13,84 % dengan nilai FDI nya sebesar USD 73,036.66 miliar.

Pada tahun 2009, dimana dunia mengalami krisis global yang disebabkan Amerika Serikat yaitu bangkrutnya Lehman Brothers lembaga keuangan besar karena kasus *subprime mortgage* kegagalan sektor properti. Indonesia tercatat FDI menurun dari USD. 9,318.45 miliar menjadi USD. 4,877.37 miliar. Singapura tetap meningkat dari USD. 8,588.19 miliar menjadi USD. 15,278.60 miliar. Malaysia juga menurun dari USD. 7,375.91 miliar menjadi USD. 1,387.39 miliar. Dan Thailand FDI nya menurun hampir 50 % dari USD. 8,538.34 menjadi USD. 4,853.96.

Pada tahun 2012 Indonesia mencatat FDI tertinggi secara nasional, yaitu sebesar USD. 28,472.73 miliar. Melihat pertumbuhan yang semakin baik untuk iklim investasi asing langsung, maka Pemerintah proaktif dalam mengampanyekan tentang MP3ES yang akhir-akhir ini menjadi populer dikalangan akademisi, para ekonom dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Indonesia masih menjadi tujuan investasi negara lain, karena memiliki pasar luas karena jumlah penduduk kini sebesar 240 jutaan jiwa dan memiliki peluang bisnis yang menjanjikan, namun FDI di Indonesia investasinya berupa padat modal, dan walaupun ada peluang bagi buruh direkrut dari pasar tenaga kerja melalui perusahaan *outsourcing*, hal ini karena pertimbangan kenaikan upah yang tinggi terutama sejak tahun 2005 karena kenaikan BBM, maka upah disesuaikan dua kali yaitu, pada bulan Mei dan Oktober 2005. Pada tahun 2013 kenaikan upah /UMP di Jabodetabek hingga diatas 40 persen, dan menimbulkan kontraksi pada pertumbuhan Industri nasional.

Pengangguran.

Menyoroti persoalan tentang pengangguran tidak terlepas dari berkelanjutannya transfer manusia dan aktivitas ekonomi secara terus menerus dari

penduduk pedesaan ke perkotaan, sehingga pembangunan ekonomi tetap diharapkan terus tumbuh didaerah perkotaan. Ada beberapa penyebab terjadinya pengangguran yaitu karena penghematan tenaga kerja untuk efisiensi, dan karena perkembangan teknologi seperti pertanian, perkebunan yang mendorong urbanisasi angkatan kerja dari desa ke perkotaan. (Mudrajad Kuncoro. 2010, hal. 127).

Pengangguran di Indonesia tidak terlepas dari eksodus urbanisasi penduduk dari desa ke kota-kota yang semakin tidak terkendali, sehingga menambah kemacetan luar biasa disetiap kota seperti Jakarta, Surabaya, Semarang, Yogyakarta, Solo, Denpasar bali dan lain-lain khususnya pulau Jawa sudah penuh sesak, sedangkan lapangan pekerjaan masih kurang untuk menampung mereka yang membutuhkan lapangan pekerjaan. Tenaga Kerja Indonesia baik TKI maupun TKW banyak bermasalah di luar negeri misalnya di Singapura dan Malaysia serta Timur Tengah, mereka dipulangkan ke Indonesia dan itu berlangsung 10 (sepuluh) tahun ini sejak masa reformasi bergulir. Apa yang terjadi ketika mereka kembali ke tanah air, mereka tidak akan pulang ke kampung desanya sebab memang lapangan pekerjaan sudah tidak menjanjikan. Industri Pertanian semakin hari semakin merana karena kurang infrastruktur dan minimnya subsidi pupuk dan mahalnya kredit perbankan bagi petani, maka perkotaan adalah tujuan harapan bagi para pengangguran untuk mencoba mencari peluang pekerjaan di kota-kota besar seluruh Indonesia. Bagi yang tidak tercatat sebagai karyawan tetap sebuah institusi, mereka masuk bursa melalui perusahaan *outsourcing* yang akhir-akhir ini menjadi sorotan Serikat Pekerja Indonesia, namun sulit meniadakan karena Industri atau Perusahaan terutama PMA akan memilih yang beresiko kecil, dimana sewaktu waktu menemukan tenaga kerja yang tidak produktif langsung

diberhentikan tanpa beban, berbeda apabila tenaga kerja tersebut sudah menjadi tenaga tetap yang dicatatkan ke Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui Disnaker setempat. Pertumbuhan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang pesat karena PHK dan fakta di lapangan pekerjaan terbatas, menambah data pertumbuhan pengangguran semu, mengapa demikian?, karena jumlah angkatan kerja lebih besar dari kesempatan kerja, serta laju penduduk di Indonesia beberapa tahun terakhir ini cukup tinggi.

Sadono Sukirno dalam bukunya (2012, hal. 330) yang dimaksud pengangguran terbuka adalah pengangguran yang tercipta akibat penambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah dari penambahan tenaga kerja, akibatnya

banyak jumlah tenaga kerja yang tidak mendapatkan pekerjaan. Efek dari semua keadaan tersebut dalam jangka masa yang panjang angkatan ini tidak melakukan pekerjaan, dan mereka menganggur secara nyata dan sepenuh waktu, keadaan ini dinamakan "*pengangguran terbuka*". Pengangguran terbuka dapat pula sebagai akibat dari kegiatan ekonomi yang menurun produksi berkurang maka dilakukan pengurangan tenaga kerja, dan dari kemajuan teknologi misalnya investasi mesin-mesin otomatis atau penggunaan *tenaga outsourcing* dan beralihnya menjadi PKL atau dengan perkataan lain tenaga kerja korban PHK berwira usaha sendiri, menyebabkan kenaikan pengangguran semu.

Tabel 6. Pengangguran di Indonesia Tahun 1982 - 2013

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Pertumbuhan (Persentase)	Pengangguran (Jiwa)	Pertumbuhan (Persentase)
1982	146.532.397	0,00%	1.795.825	0,00%
1983	156.372.000	6,71%	1.368.477	-23,80%
1984	159.475.000	1,98%	1.231.529	-10,01%
1985	162.899.000	2,15%	1.457.801	18,36%
1986	166.358.000	2,12%	1.854.725	35,53%
1987	169.850.000	2,10%	1.842.870	-0,64%
1988	173.415.000	2,10%	2.077.495	12,73%
1989	177.056.000	2,10%	2.081.089	0,17%
1990	178.170.000	0,63%	2.189.089	5,19%
1991	181.384.000	1,80%	2.032.369	-7,16%
1992	184.491.000	1,71%	2.185.602	7,54%
1993	187.589.000	1,68%	2.308.285	5,61%
1994	190.676.000	1,65%	3.737.524	61,92%
		1,61%	6.251.201	67,26%

1995	193.750.000			
1996	196.807.000	1,58%	4.407.769	-29,49%
1997	199.837.000	1,54%	4.275.155	-3,01%
1998	202.873.000	1,52%	5.062.483	18,42%
1999	202.800.000	-0,04%	6.030.319	19,12%
2000	205.800.000	1,48%	5.831.231	-3,30%
2001	208.000.000	1,07%	7.739.576	32,73%
2002	212.000.000	1,92%	8.397.112	8,50%
2003	213.700.000	0,80%	9.939.301	18,37%
2004	216.400.000	1,26%	10.251.351	3,14%
2005	218.900.000	1,16%	11.899.266	16,08%
2006	222.200.000	1,51%	10.932.000	-8,13%
2007	225.100.000	1,31%	10.011.142	-8,42%
2008	227.791.000	1,20%	9.394.515	-6,16%
2009	230.632.700	1,25%	8.962.617	-4,60%
2010	233.477.400	1,23%	8.319.779	-7,17%
2011	236.313.300	1,21%	7.700.086	-7,45%
2012	239.174.300	1,21%	7.244.956	-5,91%
2013	242.013.800	3,66%	7.170.523	-13,81%
Total				
Rata-rata		1,66%		5,73%

Sumber BPS (2013) dan Kementerian Tenaga Kerja (2013) diolah

Data BPS (2013) menyatakan bahwa : Jumlah Penduduk di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun ketahun, misalnya pada tahun 1983 meningkat 6,71 % dari penduduk 146,53 juta jiwa menjadi 156,37 juta jiwa. Dan pengangguran menurun sebesar 23,80 % dari angka pengangguran 1,79 juta orang menjadi 1,37 juta orang. Hal ini menunjukkan pembangunan di Indonesia

terus ditingkatkan dengan Repelita jangka pendek, menengah dan panjang.

Memasuki era reformasi yang ditandai dengan krisis ekonomi pada tahun 1998, maka Indonesia mengalami tekanan yang cukup signifikan, dimana pertumbuhan penduduk meningkat, pengangguran meningkat dan inflasi naik.

Berdasarkan tabel diatas pada tahun 1998 : Jumlah penduduk meningkat 1,52 % dari 199,84 juta jiwa menjadi 202,87 juta

jiwa, dilain pihak Pengangguran meningkat tajam 19,12 % dari angka pengangguran 5,06 juta orang menjadi 6,03 juta orang. Dan saat itu inflasi tercatat tertinggi dua puluh tahun terakhir sebesar 77,63 persen, Indonesia mengalami keterpurukan dan pertumbuhan FDI minus -Rp.193,4 triliun, bisa dibayangkan *capital flight* keluar karena para investor asing trauma akan kerusuhan yang luar biasa terjadi pada saat itu, menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia merosot ke angka minus 13,30 persen, yang dinamakan resesi dimana siklus bisnis suatu negara turun tajam hingga titik terendah.

Sejak tahun 2005 dimulainya pemerintahan hasil pemilu langsung, berarti demokrasi secara bebas memulai sejarah baru di Indonesia, demikian kesepakatan-kesepakatan karena sebagai anggota WTO Indonesia memasuki pasar liberal yang diikuti oleh tumbuhnya jasa pasar tenaga kerja *Outsourcing* pekerja tidak tetap yang sewaktu-waktu bisa di rekrut dan diberhentikan tanpa terikat membayar uang pesangon maupun uang jasa selama masa kerja berlaku. Hal ini karena pelaku usaha khususnya pemodal asing padat modal, menuntut peningkatan produktivitas tinggi yang sewaktu-waktu dapat dilakukan evaluasi tanpa resiko membayar uang jasa dan uang pesangon yang biasa dikenal dengan istilah uang PHK dan beralihnya tenaga buruh menjadi PKL. Fenomena inilah yang menyebabkan pada data Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi 10 tahun terakhir menurun, namun sejatinya pengangguran meningkat karena PHK terjadi besar-besaran saat UMP (Upah Minimum Propinsi) meningkat tajam dan demo buruh berlanjut merugikan industri dan pelaku usaha sejak 8 (delapan) tahun terakhir.

Sebagai ilustrasi bahwa Pengangguran di Indonesia sejak tahun 2006 hingga 2013 menurun terus mulai dari angka pengangguran 11,89 juta orang pada

tahun 2005 menjadi 7,17 juta jiwa pada tahun 2013, atau menurun sebesar 35,23 persen adalah prestasi dari Pemerintah untuk pengentasan kemiskinan. Pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah yaitu jumlah penduduk pada tahun 2013 meningkat sebesar 3,66 % dari jumlah penduduk 239,17 juta jiwa menjadi 242,01 juta jiwa, ini yang menimbulkan kebutuhan barang-barang dan jasa melambung dan sempat menggegerkan masyarakat karena kelangkaan bahan makanan (kedelai, daging sapi, ayam potong, bawang, dll) pada kuartal III tahun 2013.

Daya Beli Masyarakat.

Daya beli masyarakat adalah penting sebagai manusia seutuhnya agar mampu memenuhi kebutuhannya, apakah mengenai pangan, papan, sandang dan lain-lain kebutuhan konsumsi masyarakat. Maka Pemerintah memiliki tugas penting dalam mengembangkan kegiatan ekonomi yang baru, sehingga dapat mempercepat transformasi kegiatan ekonomi dari bersifat tradisional kepada kegiatan ekonomi yang bersifat modern. Pemerintah perlu mendorong langkah kearah kemajuan sektor manufaktur. Sebab ekonomi yang semakin maju akan memerlukan berbagai jenis barang industri. Perkembangan ekonomi juga memerlukan barang-barang konsumsi yang lebih banyak dan biasanya dihasilkan oleh sektor industri, untuk terus dikembangkan kearah ekspor hasil produksinya ke negara lain. Tujuan dari kemajuan ekonomi tersebut untuk menyejahterakan masyarakat melalui peningkatan pendapatan perkapita atau PDB per jumlah penduduk, sehingga daya beli masyarakat akan semakin meningkat. (Sadono Sukirno : 2012, hal. 442).

Mudrajad Kuncoro (2010, hal. 10). Indikator ekonomi mengenai kelompok mana bila negara telah memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya dengan diukur dari pendapatan perkapitanya.

Menurut Bank Dunia pengertian pendapatan perkapita, adalah rasio antara Produk Domestik Bruto dengan populasi jumlah penduduk suatu negara. Bank Dunia mengklasifikasikan negara berdasarkan tingkat PDB/ kapita sebagai berikut:

- a. Negara berpenghasilan rendah (*low-income economies*) adalah kelompok negara-negara dengan PDB perkapita kurang atau sama dengan USD. 975.00 pada tahun 2008.
- b. Negara berpenghasilan menengah (*middle-income economies*) apabila kelompok negara-negara dengan PDB perkapita lebih dari USD. 975.00 tetapi kurang dari USD. 11,905.00 pada tahun 2008.
- c. Negara berpenghasilan tinggi (*high-income economies*) apabila kelompok negara-negara dengan PDB per kapita USD. 11,906 atau lebih pada tahun 2008

Tabel 7. Rata-rata Pertumbuhan Daya Beli Masyarakat di Indonesia tahun 1982 -2013

Tahun	Daya Beli (dalam Milyar)	Pertumbuhan (dalam rupiah)	Pertumbuhan (Persentase)
1982	856.000	-	-
1983	821.300	(34.700)	-4,05%
1984	489.990	(331.310)	-40,34%
1985	490.550	560	0,11%
1986	495.760	5.210	1,06%
1987	556.480	60.720	12,25%
1988	576.300	19.820	3,56%
1989	606.130	29.830	5,18%
1990	646.670	40.540	6,69%
1991	679.130	32.460	5,02%
1992	710.620	31.490	4,64%
1993	744.710	34.090	4,80%
1994	1.859.680	1.114.970	149,72%
1995	1.980.360	120.680	6,49%
1996	2.105.790	125.430	6,33%
1997	2.168.400	62.610	2,97%
1998	1.855.890	(312.510)	-14,41%
1999	1.870.570	14.680	0,79%
2000	6.753.010	4.882.440	261,01%
2001	6.895.190	142.180	2,11%
2002	7.130.350	235.160	3,41%
2003	7.380.300	249.950	3,51%
2004	7.654.880	274.580	3,72%
2005	7.998.240	343.360	4,49%
2006	8.312.900	314.660	3,93%
2007	8.726.460	413.560	4,97%

2008	9.015.740	289.280	3,31%
2009	9.294.250	278.510	3,09%
2010	9.739.350	445.100	4,79%
2011	10.236.220	496.870	5,10%
2012	9.490.530	(745.690)	-7,28%
2013	9.788.610	298.080	3,14%
Rata-rata Pertumbuhan			14,52%

Sumber: BPS 2013 (diolah).

Hasil hitung *geometric means* diperoleh rata-rata daya beli di Indonesia selama jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun lebih menunjukkan kemajuan 14,52 persen. Indonesia mampu bangkit dari keterpurukan pada tahun 1998 / 1999 krisis ekonomi yang memporak porandakan sendi-sendi ekonomi yang selama 32 tahun dibangun sebagai macan Asia dibawah pemerintahan Orde Baru. Pada tahun 1998 daya beli masyarakat menurun sebesar - 14,41 % dari Rp. 2.168,400 miliar per tahun menjadi Rp. 1.855,890 miliar ekuivalen (Rp. 312,510 miliar) pada tahun itu. Kemudian meningkat tajam pada tahun 2000 dimana daya beli masyarakat yang diukur dari PDB per kapita meningkat 261,01 % dari Rp. 1.870,570 miliar menjadi Rp. 6.753,010 miliar atau ekuivalen naik Rp. 4.882,440 miliar.

Analisis pada tahun 2008 Indonesia memiliki PDB per kapita Rp. 9.017,740 miliar dengan rate saat itu USD 1 = Rp.10.950,00 maka daya beli masyarakat sebesar = USD 823, 355 <USD 975,000 standar bank dunia, maka pada tahun tersebut Indonesia termasuk kelompok negara-negara berpenghasilan rendah (*low-income economies*).

Daya beli masyarakat yang semakin menurun persentase pertumbuhannya akhir-akhir ini menunjukkan bahwa inflasi yang tinggi akan menurunkan daya beli masyarakat Indonesia, karena harga-harga semakin tidak terjangkau khususnya bagi penduduk miskin. Pengangguran di Indonesia meningkat menunjukkan data semu karena beralihnya tenaga kerja yang terkena PHK menjadi PKL yang semakin meningkat di kota-kota besar di Indonesia, dan terlihat dari kemacetan yang

luar biasa dari tahun ke tahun telah menjadi keluhan setiap warga negara yang bermukim di perkotaan. PKL atau UMKM mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi sepuluh tahun terakhir, sehingga Daya beli masyarakat meningkat karena pertumbuhan PKL ini.

Penjelasan statistik deskriptif tersebut data-datanya akan dipergunakan untuk analisis seberapa besar pengaruh faktor-faktor Inflasi terhadap FDI dan Pengangguran serta dampaknya kepada Daya beli masyarakat, melalui regresi linier berganda, regresi linier sederhana, yang diawali dengan uji asumsi klasik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Koefisien Regresi Model 1

Pengaruh Faktor-faktor Jumlah uang beredar M2, Harga BBM, ICOR, Suku bunga kredit, Kurs, dan *Terms of Trade* terhadap Inflasi secara simultan diperoleh hasil $R=0,598$ dan $Adjusted R^2 = 0,698$. Dengan demikian secara statistik, pengaruh faktor-faktor : Jumlah uang beredar M2, Harga BBM, ICOR, Suku bunga kredit, Kurs, dan *Terms of Trade* terhadap Inflasi sebesar ($Adjusted R^2 = 0,698$) atau sebesar 69,80 persen, sisanya 30,20 persen dipengaruhi oleh variabel-variabel atau faktor-faktor lain diluar model yang diteliti.

Berdasarkan hasil pengolahan data statistik koefisien regresi pengaruh faktor-faktor Jumlah uang beredar M2, Harga BBM, ICOR, Suku bunga kredit, Kurs, dan *Terms of Trade* terhadap Inflasi, melalui model persamaan sebagai berikut:

Koefisien regresi Jumlah uang beredar M2 (X_1) = - 10,49, meningkat 1 persen dengan anggapan variabel-variabel independen lainnya Harga BBM, ICOR, Suku bunga kredit, Kurs, dan *Terms of Trade* konstan (*ceteris paribus*), maka Inflasi di Indonesia akan menurun sebesar 10,49 persen. Faktor uang beredar sangat berpengaruh terhadap Inflasi, melalui uji parsial (signifikansi) t dengan tingkat kesalahan $\alpha = 0,05$, dan $df = n-k-1$, ($32-6-1=25$) maka diperoleh t tabel = 1,708. : t hitung = $| - 3,163 | > t$ tabel = 1,708, dengan demikian terdapat pengaruh negatif dan signifikan Jumlah uang beredar terhadap Inflasi.

Berdasarkan pendapat Sadono Sukirno (2012, hal. 296-297), pandangan teori kuantitas mengenai perubahan penawaran uang akan menimbulkan perubahan yang sama tingkatnya keatas dengan harga-harga, dan perubahan kedua variabel tersebut adalah kearah yang sama, artinya apabila penawaran uang bertambah lima persen, maka harga - harga akan bertambah lima persen juga. Kenaikan harga yang terus menerus menimbulkan inflasi. Teori kuantitas Irving Fisher : $MV = PT$, dimana M penawaran uang, V adalah laju peredaran uang, P adalah tingkat harga dan T adalah jumlah barang-barang dan jasa yang diperjual belikan dalam perekonomian, dan M tersebut diasumsikan arti sempit $M1 =$ uang kartal + giral (simpanan giro).

Sedangkan dalam penelitian ini, bahwa jumlah uang beredar M2 yaitu M1 ditambah uang simpanan dalam tabungan dan deposito berjangka, merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan permintaan agregat. Pendapat Tulus Tambunan (2011, hal 278) dijelaskan sejak tahun 2000-2008 kenaikan uang quasi bertambah Rp, 584,80 trilyun menjadi Rp. 1.417,50 triliun = 75,24 % dari M2 (Total jumlah uang beredar) Rp.1.883,90. Oleh sebab itu di Indonesia Jumlah uang beredar M2 sesungguhnya banyak dalam simpanan berupa uang quasi dan simpanan, deposito berjangka cenderung dalam mata uang asing

seperti dolar AS, dolar Singapura dll, menyebabkan Inflasi justru menurun. Hasil penelitian ini dapat dikatakan bahwa terdapat temuan baru yang menyatakan bertambahnya jumlah uang beredar M2 akan menurunkan Inflasi di Indonesia.

Koefisien Harga BBM (X_2) = 5,817 meningkat sebesar 1 persen sementara faktor-faktor Jumlah uang beredar M2, ICOR, Suku bunga kredit, Kurs, dan *Terms of Trade* dianggap konstan atau *ceteris paribus*, Inflasi akan meningkat 5,817 persen. BBM Premium adalah salah satu kelompok bahan bakar yang disubsidi Pemerintah, kebutuhan yang terus meningkat karena beberapa hal: 1). Perubahan harga minyak mentah Indonesia dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS karena BBM di impor. 2). Pembayaran kekurangan subsidi tahun sebelumnya dan menyebabkan defisit anggaran yang besar. Maka ketika sebagian subsidi dicabut menyebabkan harga BBM akan naik, dan mengakibatkan harga-harga barang dan jasa di pasar perekonomian naik dan menyebabkan Inflasi (Nota Keuangan, 2013, hal.4.7). Kebutuhan pokok seperti BBM merupakan bagian dari permintaan agregat. Permintaan agregat (*aggregate demand*) merupakan hubungan antara jumlah output yang diminta dan tingkat harga agregat. Sehingga kurva permintaan akan menunjukkan hubungan harga yang berbanding terbalik dengan kuantitas yang diminta. (Mankiw, Gregory.2007, hal.256).

Dengan kebutuhan yang semakin meningkat, persediaan BBM pemerintah terbatas, maka harga akan dinaikkan, artinya Pemerintah tidak mampu lagi menahan defisit perdagangan karena barang-barang tersebut impor, maka terjadilah lonjakan permintaan menimbulkan inflasi yang disebut *demand pull inflation*.

Berdasarkan olah data statistik diperoleh t hitung = 1,789 $>$ t tabel = 1,708, artinya pengaruh Harga BBM secara parsial terhadap inflasi adalah signifikan. Kebijakan pemerintah tentang pencabutan BBM

bersubsidi akan berpengaruh meningkatkan harga-harga umum dipasaran dan meningkatkan Inflasi di Indonesia.

Koefisien regresi pengaruh variabel ICOR (X_3) sebesar $= - 1,052$ meningkat 1 persen dimana faktor-faktor lain Jumlah uang beredar M2, Harga BBM, Suku bunga kredit, Kurs, dan *Terms of Trade* dianggap konstan atau *ceteris paribus*, maka Inflasi akan menurun sebesar 1,052 persen.

Menurut Yuyun Wirasasmita (2012, hal. 2) tentang ICOR yang menentukan jumlah investasi, merupakan perbandingan antara pertambahan Investasi terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara, apabila ICOR meningkat maka tambahan investasi yang harus dilakukan menjadi meningkat bahkan proyek berhenti karena banyak kebocoran-kebocoran. Pendapat senada juga dikemukakan Komite Ekonomi Nasional (2012, hal 4) bahwa ICOR sangat menentukan jalannya investasi, ICOR yang melampaui ketentuan akhirnya akan menimbulkan pemborosan, sehingga bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi dan Investasi tidak berjalan sesuai rencana, menimbulkan inflasi. Di Indonesia pada kenyataan berlawanan dengan teori, tambahan investasi yang meningkat dibarengi dengan penawaran agregat yaitu peningkatan produksi komoditas non migas seperti minyak kelapa sawit, kopra dll beberapa tahun terakhir sehingga inflasi menurun. Berdasarkan olah data melalui uji t, diperoleh t hitung angka mutlak $= | - 3,984 | >$ dari t tabel $= 1,708$, dengan demikian meningkatnya ICOR yang dibarengi penawaran agregat berupa meningkatnya produksi nasional non migas menurunkan Inflasi di Indonesia.

Koefisien regresi faktor Suku bunga kredit (X_4) $= 1,731$, meningkat sebesar 1 persen, sedangkan faktor-faktor lain, Jumlah uang beredar M2, Harga BBM, ICOR, Kurs, dan *Terms of Trade* dianggap konstan, maka akan meningkatkan 1,731 persen Inflasi di Indonesia.

Suku bunga kredit, pengertian bunga adalah harga atau balas jasa bagi uang atau dana yang dipinjamkan. Dua faktor yang menyebabkan timbulnya bunga yaitu *time preference* yaitu pengorbanan atas resiko kehilangan atau tertundanya memperoleh keuntungan atau kehilangan kepuasan mengkonsumsi barang, maka orang akan menuntut balas jasa berupa kelebihan pengembalian uang atas pokok yang dipinjamkan. dan *liquidity preference* yaitu pelaku yang menyebabkan terjadinya bunga ini adalah pihak yang meminjamkan uang dan pihak yang meminjam uang atau dana tersebut. Semakin tinggi tingkat bunga menyebabkan semakin banyak uang yang tersedia (penawaran) untuk dipinjamkan, sebaliknya bagi sisi peminjam semakin tinggi bunga pinjaman maka semakin kecil jumlah uang yang dibutuhkan (permintaan) karena semakin mahal biaya imbal jasanya (Eddy Sugiarto dan Mardiyono.2011, hal. 63-64). Suku bunga kredit adalah faktor penting yang diperlukan untuk menopang proses produksi, hampir seluruh sektor usaha dibiayai oleh minimal kredit modal kerja (KMK) oleh bank komersial. Faktor suku bunga kredit akan mempengaruhi aktivitas ekonomi terutama bagi industri yang pendanaannya sebagian besar dibiayai dengan kredit bank, semakin tinggi suku bunga pinjaman akan membebani industri, dan aktivitas ekonomi melambat, sehingga harga pokok meningkat dan mendorong kenaikan harga di pasar menimbulkan *cost push inflation*. Seseorang atau pengusaha akan bertindak hati-hati dalam investasi walaupun ia harus meminjam uang dari lembaga keuangan, investasi usaha yang direncanakan, hanya akan dilaksanakan apabila tingkat keuntungan yang akan diperolehnya adalah lebih dari suku bunga yang harus dibayar. Apabila tidak maka ongkos yang dibayarkan sebagai bunga pinjaman akan menimbulkan kerugian yang pada akhirnya akan dibebankan kepada harga produksinya (Sadono Sukirno. 2012, hal.123). Uji oleh data statistik menunjukkan faktor Suku bunga

krdit melalui uji-t dimana $t_{hitung} = 4,952 > t_{tabel} = 1,708$, dengan demikian kenaikan suku bunga kredit berpengaruh meningkatkan Inflasi.

Koefisien Kurs (X_5) = 1,708 meningkat sebesar 1 persen, sedangkan faktor-faktor Jumlah uang beredar M2, Harga BBM, ICOR, dan *Terms of Trade* dianggap konstan atau ceteris paribus, Inflasi meningkat sebesar 1,708 persen. Peran kurs sebagai nilai tukar mata uang adalah harga dari mata uang yang harus ditentukan dalam sistem ekonomi. Alat tukar ini sangat penting untuk alat transaksi internasional. (Anindita & Reed. 2008, hal. 103), dalam sistem penyeimbangan melalui perubahan kurs (devaluasi untuk defisit dan revaluasi untuk surplus). Perubahan kurs ini di samping akan menimbulkan ongkos riil dalam proses penyesuaian produksi dan konsumsi, juga tidak dapat dipastikan bahwa keseimbangan akan tercapai. Keseimbangan devaluasi untuk menghilangkan atau mengurangi ketidak seimbangan tergantung pada elastisitas permintaan dan penawaran valuta asing, semakin elastis permintaan akan barang ekspor dari negara lain dan impor suatu negara, devaluasi akan makin efektif (Nopirin. 2012, hal. 182). Di Indonesia untuk kebutuhan bahan baku, alat-alat produksi sekitar 70 persen impor dari negara lain (Kadin, FGD 2013, hal 2), maka fluktuasi kurs akan berpengaruh pada rupiah, semakin merosot nilainya maka harga satuan bahan/alat-alat produksi akan menjadi mahal dan menekan produksi sehingga tidak efisien menyebabkan kenaikan harga barang, dan menimbulkan inflasi. Penelitian ini menunjukkan hasil olah data uji thitung = 3,365 > dari $t_{tabel} = 1,708$, maka kenaikan Kurs sangat berpengaruh meningkatkan Inflasi (*cost push inflation*) di Indonesia.

Koefisien regresi *Terms of Trade* (X_6) = - 0,265 meningkat 1 persen, sedangkan faktor-faktor lain Jumlah uang beredar M2, Harga BBM, ICOR, Suku bunga kredit, Kurs, dan *Terms of Trade* dianggap konstan atau ceteris paribus, maka Inflasi akan menurun

sebesar 0,265 persen. Dinamika keunggulan kompetitif dan peran pemerintah sangat penting di era globalisasi menuju masyarakat ekonomi Asean (MEA 2015) peran industri atau perusahaan suatu negara dalam hal inovasi dalam mengatasi kekurangan faktor-faktor misalnya harga bahan dan upah di efisienkan secara optimal, maka industri atau perusahaan akan memiliki daya saing tinggi dan meningkatkan ekspornya. Kebijakan pemerintah dan deregulasinya dapat membantu industri mengembangkan keunggulan kompetitif jika kebijakan dan deregulasi tersebut ditata sebelumnya, dengan demikian diharapkan nilai ekspor lebih besar dari impornya (Anindita Ratya & Reed, Michael R 2008, hal. 166), meskipun masih terdapat beberapa perbedaan pandangan mengenai *Terms of Trade* (TOT), namun masih sangat penting untuk dibicarakan, sebab apa yang disebut TOT tersebut memiliki pengaruh besar terhadap kesejahteraan suatu bangsa dan sekaligus sebagai alat ukur posisi perdagangan luar negeri suatu bangsa (Nopirin. 2012, hal. 71). Pengukuran TOT ini merupakan perbandingan antara indeks harga ekspor dengan indeks harga impornya yang terdiri dari ekspor non migas terhadap impornya. Selama 20 tahun terakhir TOT meningkat, namun merosot pada tahun 2012-2013 karena defisit perdagangan bidang migas. Secara keseluruhan Indonesia masih harus berjuang untuk meningkatkan ekspor non migasnya, mengurangi pemakaian BBM impor harus mulai menggunakan bahan bakar bio disel, maka TOT akan semakin besar dan dapat menekan kenaikan harga untuk ekspor. Berdasarkan olah data uji t_{hitung} : angka mutlak $| - 3,711 | > t_{tabel} = 1,708$, maka dapat disimpulkan bahwa peningkatan *Terms of Trade* akan menurunkan atau menekan laju Inflasi di Indonesia.

Hasil Analisis koefisien regresi model 2

Hasil regresi pengaruh Inflasi (Y^{\wedge}) terhadap Investasi Asing Langsung (Z_1) adalah sebesar = 0,969, artinya bila Investasi

Asing Langsung meningkat 1 persen, maka Inflasi akan meningkat sebesar 0,969 persen. Inflasi di Indonesia berpengaruh positif terhadap Investasi Asing Langsung, karena inflasinya pada tingkat moderat antara 5-8 persen, yang diharapkan diikuti pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan uji signifikansi parsial uji-t diperoleh hasil $t_{hitung} = 11,629 > t_{tabel} = 1,708$ yang diperoleh dari statistik t pada taraf $\alpha = 0,05$ dengan $df = (n-k-1) = 27-1-1 = 25$, maka dengan uji t , didapat $t_{tabel} = 1,708$, artinya Inflasi di Indonesia berpengaruh positif signifikan terhadap Investasi Asing Langsung yang masuk ke Indonesia. Menurut Boediono (2012, hal. 159) Inflasi sebagai gejala ekonomi ditandai kecenderungan harga-harga menaik, dalam prakteknya untuk masalah inflasi bukan hanya masalah ekonomi, namun sudah merupakan masalah sosio ekonomi politis, karena di Indonesia pada 10 tahun terakhir memiliki tingkat inflasi moderat, situasi keamanan stabil, pertumbuhan ekonomi > 5 persen menarik untuk pertumbuhan investasi asing langsung dibandingkan negara-negara Amerika, Eropa memiliki pertumbuhan < 3 persen (BPS, 2013). Sehingga inflasi moderat berpengaruh positif terhadap FDI di Indonesia.

Hasil Analisis koefisien regresi model 3

Hasil regresi pengaruh Inflasi (Y^{\wedge}), terhadap Pengangguran (Z_2) hasil $R = 0,931$ dan $R^2 = 0,867$. Dengan demikian secara statistik, Inflasi dan Pengangguran memiliki hubungan yang kuat positif ditunjukkan oleh angka koefisien korelasi sebesar $R = 0,931 > 0$ dan mendekati angka 1 (Husein Umar : 2002, hal. 178). Pengaruh variabel Inflasi terhadap Pengangguran ($R^2 = 0,867$) atau sebesar 86,70 persen, sisanya 13,30 persen dipengaruhi oleh variabel-variabel atau faktor-faktor lain diluar model yang diteliti.

Berdasarkan hasil pengolahan data statistik koefisien regresi pengaruh faktor Inflasi terhadap Pengangguran melalui model persamaan sebagai berikut:

Koefisien regresi Inflasi (Y^{\wedge}) = 0,348 meningkat 1 persen, maka Pengangguran di Indonesia akan meningkat sebesar 0,348 persen. Faktor berpengaruh Inflasi terhadap Pengangguran, sesuai hasil uji parsial (uji-t) yaitu $t_{hitung} = 13,947 > t_{tabel} = 1,708$ ($n-k-1 = 27- 1-1=25$), dengan demikian pengaruh Inflasi terhadap Pengangguran kuat positif, dan perlu diperhatikan seksama tentang inflasi seharusnya memiliki *slope* atau angka arah negatif, namun hasil penelitian model ini di Indonesia berlawanan arah artinya tidak sesuai dengan dengan teori kurva Philips atau peneliti Amerika terdahulu (Rossiter, Rosemary : 1997). Teori kurva Philips menyatakan hubungan antara inflasi dan pengangguran dinyatakan oleh kurva Philips yaitu apabila terjadi inflasi maka pengangguran akan menurun, artinya ketika ada kenaikan inflasi maka aktivitas ekonomi menggeliat dan kesempatan kerja bertambah dan pengangguran berkurang (Samuelson & Nordhaus : 2004, hal. 394). Teori yang sama tentang kurva Philips adalah hubungan negatif antara laju inflasi dan tingkat pengangguran (Rudiger & Stanley Ficher 1984 : hal.491). Inflasi di Indonesia meningkat tidak serta merta diikuti oleh penurunan pengangguran, karena pada saat inflasi naik karena tekanan permintaan barang-barang seperti daging sapi, kedelai, dan bahan-bahan makanan lainnya, bersamaan terjadi kenaikan harga bahan-bahan produksi, mesin-mesin yang diimpor dalam keadaan rupiah menurun nilainya terhadap mata uang asing yang digunakan untuk transaksi pembayaran menyebabkan kenaikan harga pokok produksi dampaknya industri harus mengurangi output, dan terjadilah *cost push inflation*, akibat dari keadaan ini pengurangan tenaga kerja tidak terhindarkan, dan dampaknya pengangguran di Indonesia bertambah selama periode 1982 sd 2013, artinya ketika inflasi naik maka pengangguran juga naik dan sebaliknya apabila inflasi menurun maka pengangguran akan menurun.

Hasil Analisis koefisien regresi model 4

Pengaruh Inflasi (Y^{\wedge}), Investasi Asing Langsung (Z_1^{\wedge}), dan Pengangguran (Z_2^{\wedge}) terhadap Daya Beli Masyarakat (Z_3) diperoleh dari hasil statistik $R = 0,889$ menunjukkan hubungan antara variabel Inflasi, Investasi Asing Langsung (FDI), dan Pengangguran korelasinya kuat dan positif, sedangkan kuatnya pengaruh secara simultan (R^2) = 0,912, hasil penelitian ini menerangkan bahwa pengaruh variabel-variabel independen tersebut sebesar 91,20 persen terhadap Daya beli masyarakat, dan sisanya 8,80 persen dipengaruhi oleh variabel-variabel lain di luar model yang diteliti.

Pengaruh Inflasi, Investasi Asing, dan Pengangguran secara **parsial** terhadap Daya beli masyarakat dijelaskan oleh koefisien regresi masing-masing variabel independen pada model 4 adalah sebagai berikut :

Koefisien regresi untuk nilai variabel Inflasi (Y^{\wedge}) = - 0,066, artinya meningkatnya angka Inflasi sebesar 1 persen sedangkan variabel Investasi Asing langsung, dan Pengangguran dianggap konstan atau *ceteris paribus*, maka Daya beli masyarakat akan menurun sebesar 0,066 persen. Berdasarkan hasil uji signifikansi uji-t atau uji parsial $t_{hitung} = \text{angka mutlak } | - 2,102 | > \text{ dari } t_{tabel} = 1,711$, maka Inflasi berpengaruh negatif secara parsial terhadap Daya beli masyarakat. Berdasarkan koefisien regresinya bahwa pada kenyataan ketika inflasi meningkat maka pengaruh langsung adalah kepada Daya beli masyarakat di Indonesia. Pendapat Sadono Sukirno (2012. Hal. 15), bahwa salah satu akibat penting dari inflasi ialah akan cenderung menurunkan taraf kemakmuran golongan masyarakat. Sebagian besar pelaku-pelaku kegiatan ekonomi terdiri dari pekerja-pekerja yang bergaji atau pendapatannya tetap. Karena kenaikan inflasi lebih cepat dari kenaikan upah riil, maka nilai upah riil masyarakat akan merosot disebabkan oleh inflasi, ini berarti kemerosotan daya beli mereka terjadi, setiap kenaikan inflasi maka daya beli masyarakat akan menurun.

Koefisien regresi variabel Investasi Asing Langsung (Z_1^{\wedge}) terhadap variabel Pengangguran (Z_2^{\wedge}) secara statistik diperoleh hasil 0,161, artinya apabila Investasi Asing Langsung meningkat sebesar 1 persen sedangkan variabel Inflasi dan Pengangguran dianggap konstan atau *ceteris paribus*, maka Daya beli masyarakat meningkat sebesar 0,161 persen. Hasil koefisien regresi tersebut sejalan dengan uji signifikansi uji-t (uji parsial) yang diperoleh $t_{hitung} = 2,012$ dan dibandingkan dengan t_{tabel} yang diperoleh dari statistik t pada $\alpha = 0,05$ $df = (n-k-1 = 27-3-1 = 23)$ didapat $t_{tabel} = 1,711$. Hasil uji t diperoleh hasil bahwa $t_{hitung} = 2,012 > t_{tabel} = 1,711$, maka pengaruh Investasi Asing Langsung positif secara parsial terhadap Daya beli masyarakat di Indonesia. Setiap ada pertumbuhan positif dari Investasi Asing Langsung ke Indonesia akan meningkatkan Daya beli masyarakat, yang dapat diukur dari bertambahnya PDB per kapita, ini berarti menambah kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

Selaras dengan pendapat (Anindita Ratya & Reed, Michael R 2008, hal. 149), keuntungan dari FDI yang didapat oleh negara tuan rumah sangat mudah dilihat daripada keuntungan yang didapat oleh negara asal (pengirim). Ketika *Multi National Company* (MNC) memutuskan untuk mendirikan pabrik di negara tuan rumah, maka segera akan diperoleh keuntungan berupa terbukanya lapangan kerja dan pendapatan dari produksi. Disamping itu ada keuntungan secara tidak langsung yaitu teknologi baru, manajemen dan persaingan yang dibawa oleh MNC akan meningkatkan keterampilan dan keahlian kerja para buruh. Hal ini akan meningkatkan pendapatan perkapita bagi negara tuan rumah.

Koefisien regresi untuk nilai variabel Pengangguran (Z_2^{\wedge}) adalah = 1,441, artinya meningkatnya Pengangguran di Indonesia sebesar 1 persen, dimana variabel-variabel independen lainnya dianggap konstan atau *ceteris paribus*, maka Daya beli masyarakat

akan bertambah 1,441 persen. hasil uji t signifikansi uji parsial $t = 6,289 > t_{\text{tabel}} = 1,711$. Maka terdapat pengaruh positif secara parsial variabel Pengangguran terhadap Daya beli masyarakat di Indonesia. Hal ini ironis bahwa bertambahnya pengangguran di Indonesia justru menyebabkan meningkatkan Daya beli masyarakat, seperti yang diuraikan terdahulu bahwa pengaruh teknologi baru dan pasar tenaga kerja *outsourcing* yang marak pasca reformasi sejak tahun 1999, membuat meningkatnya pengangguran (semu) yaitu PHK dari pekerja tetap masuk tenaga *outsourcing* di Indonesia dan tumbuhnya Pedagang kaki lima (PKL) yang merupakan UMKM skala mikro ekonomi, sedangkan PDB terus bertambah melebihi rata-rata pertambahan penduduk di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi yang cepat tidak serta merta diikuti oleh tingkat kesejahteraan rakyatnya secara merata, atau pertumbuhan ekonomi yang cepat tidak dengan sendirinya diikuti oleh pertumbuhan atau perbaikan distribusi keuntungan bagi segenap penduduk (Todaro, Michael & Smith. C Stephen : 2006, hal.260).

SIMPULAN DAN SARAN

Faktor-faktor Jumlah uang beredar M2, Harga BBM, ICOR, Suku bunga kredit, Kurs, dan *Terms of Trade* secara simultan dan parsial berpengaruh terhadap Inflasi di Indonesia. Faktor-faktor dominan yang memengaruhi Inflasi yakni, Kurs dan Suku bunga kredit merupakan bagian dari *cost push inflation*, selanjutnya Harga BBM dan Jumlah uang beredar M2 merupakan bagian dari *demand pull inflation*.

Inflasi berpengaruh positif terhadap Investasi Asing Langsung, artinya, Inflasi yang meningkat akan berpengaruh menaikkan Investasi Asing Langsung, hal ini menunjukkan Inflasi memiliki hubungan searah dengan FDI di Indonesia.

Inflasi berpengaruh positif terhadap Pengangguran di Indonesia, artinya Inflasi yang meningkat akan menaikkan

Pengangguran, hal ini menunjukkan Inflasi memiliki hubungan searah dengan Pengangguran di Indonesia.

Inflasi, Investasi Asing Langsung, dan Pengangguran berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap Daya beli masyarakat di Indonesia. Faktor paling dominan berpengaruh terhadap Daya beli masyarakat di Indonesia adalah Pengangguran.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis pembahasan, maka penelitian ini telah menghasilkan model dengan temuan – temuan baru yaitu pada model satu, model dua, dan model empat **menggantikan teori yang ada** dari penelitian- penelitian terdahulu, yaitu mengembangkan, memperkaya pendekatan **teori baru** yang adaptif dengan konteks Indonesia. Model juga memiliki tingkat *accuracy of the estimates of the parameters* yang akurat signifikan dan tidak bias, memiliki tingkat *explanatory ability* yang tinggi dalam hal menjelaskan pengaruh faktor-faktor Jumlah Uang beredar M2, Harga BBM, ICOR, Suku bunga kredit, Kurs, dan *Terms of Trade* terhadap Inflasi, dan pengaruhnya terhadap Investasi Asing Langsung, dan Pengangguran serta dampaknya kepada Daya beli masyarakat di Indonesia.

Selanjutnya dapat disampaikan saran-saran sebagai berikut : Untuk dapat menekan laju Inflasi (*demand pull* dan *cost push*), maka disarankan kepada Pemerintah tetap pada kebijakan selama ini yaitu mengendalikan faktor-faktor dominan yang mempengaruhi *demand pull inflation* antara lain : Kebijakan Harga BBM, setiap kenaikan harga BBM akan memicu kenaikan harga-harga barang dan jasa lainnya, maka Pemerintah khususnya di bawah koordinator Menko Perekonomian, diminta jangan mengulur-ulur waktu saat mengumumkannya, dengan kompensasi membuka lapangan pekerjaan di Pedesaan selaras dengan disahkannya UU Desa tahun 2013, Jumlah uang beredar M2, langkah BI sudah tepat dan terus didorong melakukan pengendalian

dengan terus memperbesar uang quasi dalam bentuk simpanan deposito jangka panjang, sehingga peredaran uang menekan laju Inflasi seperti yang terjadi saat ini di Indonesia, ICOR berpengaruh negatif secara parsial terhadap inflasi, maka Pemerintah sudah tepat mendorong *aggregate supply* antara lain meningkatkan output non migas seperti saat sekarang, ditengah defisit perdagangan migas yang terus meningkat. Faktor-faktor yang dapat memengaruhi *cost push inflation* : BI diharapkan menjaga stabilitas nilai tukar Kurs, sehingga tidak merosot terus menerus, karena bahan baku dan barang modal di Indonesia sangat tergantung impor dan ini akan memicu kenaikan harga barang produksi memicu inflasi, Suku bunga kredit perlu diperhitungkan secara cermat agar tidak membebani ongkos produksi yang mengakibatkan biaya produksi tinggi, dan Pemerintah diharapkan memberikan insentif kemudahan birokrasi perijinan, pajak dll. kepada aktivitas ekspor agar *Terms of Trade* yang terus merosot bisa meningkat, dan dampaknya bisa menekan inflasi.

Disarankan kepada BI untuk tetap mempertahankan inflasi pada tingkat moderat sekitar 5 persen atau di bawah pertumbuhan ekonomi, sehingga Investasi Asing Langsung atau yang berpengaruh positif dengan Inflasi saat ini terus tumbuh, baik ekspansi yang sudah ada, maupun investasi asing langsung yang baru, masuk ke Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian, Inflasi berpengaruh positif terhadap Pengangguran di Indonesia, disarankan kepada BI secara terus menerus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan kepada Pemerintah menyederhanakan birokrasi sehingga kenaikan harga bahan baku, barang modal yang diimpor dapat memicu *cost push inflation* dapat ditekan, untuk mengurangi PHK yang dapat menambah pengangguran di Indonesia.

Disarankan kepada BI agar inflasi dikendalikan karena inflasi tinggi dampaknya langsung negatif kepada Daya beli

masyarakat, Investasi Asing langsung, terus didorong agar semakin tumbuh sebagai investor padat karya di Indonesia, sehingga Daya beli masyarakat terus meningkat, demikian juga terhadap Pengangguran, disarankan kepada Pemerintah melalui BPS agar melakukan pendataan ulang terhadap jumlah pengangguran terbuka di Indonesia, akibat PHK disebabkan hadirnya investasi sepuluh tahun terakhir berupa padat modal, dan beralihnya pekerja yang terkena PHK tersebut menjadi PKL, sehingga menimbulkan kenaikan pengangguran semu berpengaruh meningkatkan Daya beli masyarakat di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Aulia Pohan. "Kerangka Kebijakan Moneter & Implementasinya di Indonesia"
PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta, 2008.
- Bank Indonesia. "Undang-Undang no. 23 tahun 1999 tentang Bank Indoneisa"
Jakarta. 1999. Bank Indonesia. "Pengertian Tentang Inflasi"
<http://opinimasding.blogspot.com/2010/08/b-pengertian-inflasi-menurut-bi-bank.html>, jam 23.31. Jakarta, 2010.
- Bank Indonesia. "Data-data Jumlah Uang Beredar M2, Suku Bunga Kredit, Kurs"
BI, Jakarta, 2013.
- Badan Pusat Statistik. "Berita Resmi BPS tentang Inflasi"
BPS. Jakarta, 2000.
- Badan Pusat Statistik "Berita Resmi BPS tentang Daya Beli Masyarakat"
BPS, Jakarta, 2013.
- Badan Koordinator Penanaman Modal. "Daftar Penanaman Modal PMA dan PMDN"
Jakarta, 2013.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. "Data ICOR dan Rumusan perhitungannya"
Jakarta, 2013.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. "Data Terms of Trade"
Bappenas, Jakarta, 2013.
- Burhan Bungin. "Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi Format-Format

- Kuantitatif dan Kualitatif*” Kencana Prenada Media Group. Jakarta, 2013.
- Chatib Basri, dkk.”*Rumah Ekonomi Rumah Budaya*” Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, 2012.
- Dornbusch, Rudiger dan Ficher, Stanley. “*Makro Ekonomi*” Penerjemah Rudy. P. Sitompul. Penerbit Erlangga. Jakarta, 1984.
- Fisher, Irving. “*Elementary Principles of Economics*” Cosimo, Inc. Po Box 416, Old Chelsea Station, New York, NY 10113-0416. 2006.
- Eddy Soegiarto dan Mardiyono.”*Pengantar Teori Ekonomi*” Mahkota Ilmu Tangerang, 2011.
- Gujarati, Damodar.”*Dasar-dasar Ekonometrika*” Penerjemah Carlos Mangunsong. Penerbit Erlangga, 2007.
- Henry Faizal Noor.”*Ekonomi Publik Ekonomi Untuk Kesejahteraan Rakyat*” Akademia Permata. Padang Indonesia, 2013.
- Hidayat Amir. “*Penguatan Hubungan Ekonomi dan Keuangan Internasional dalam Mendukung Pembangunan Nasional*” PT. Nagakusuma Media Kreatif, Jakarta, 2012.
- Husein Umar. “*Metode Riset Bisnis*” PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, 2002.
- Kadin Indonesia dan Kemenperin, “*FGD II Dukungan dan Sinergi Kebijakan Antar Kementrian Dalam Tahapan Pembangunan Industri Nasional*” Kajian Akademis. Jakarta, 24 Juni 2013.
- Kadin Indonesia “*Subsidi Energi dan BBM Pengaruhnya terhadap Industri*” Policy Paper, Jakarta, 2013.
- Kautsoyiannis.”*Theory of Econometrics : An Introductory Exposition Econometric Methods*”. The Macmillann Press Ltd, United Kingdom, 1990.
- KEN (Komite Ekonomi Nasional).”*Prospek Ekonomi Indonesia 2013*” Jakarta, 2012.
- Krugman, Paul & Obstfeld, Maurice “*Ekonomi Internasional Teori Dan Kebijakan*”. Alih bahasa oleh Faisal Basri, PT. Indeks Kelompok Gramedia. Jakarta, 2004.
- Mankiw. N. Gregory.”*Makro Ekonomi*” Penerjemah Fitria Liza dan Imam Nurmawan. Penerbit Erlangga, Jakarta, 2007.
- Masngudi. “*Ilmu Ekonomi Internasional*” Penerbit FE Unbor, Jakarta, 2012.
- McKenzie. “*Macroeconomics*” Houghton Mifflin Company, One Beacon Street, Boston, Massachusetts. 02108, USA, 1986.
- McMillan, Alexander. “*Macroeconomics The Canadian Context*” Prentice Hall Canadian Inc. Canada, 1983.
- Miura, Hideyuki. “*Analysis of Industrial and Trade Policies of Japan and Free Trade Agreement in Asia-Pacific Region*”, www.hoganlovells.com. Tokyo, 2013.
- Mudrajad Kuncoro.”*Dasar-dasar Ekonomi Pembangunan*” UPP STIM. Yogyakarta, 2010.
- Nandang Najmulmunir.”*Dampak kebijakan harga Minyak Terhadap Daya Beli Masyarakat*”, Jurnal Madani. Edisi II, Nopember 2008.
- Nandang Utama.”*Dampak Kebijakan harga Minyak Terhadap Daya Beli Masyarakat*” Jurnal Madani. Edisi Nopember, 2008.
- Nopirin. “*Ekonomi Internasional*” BPFE UGM, Yogyakarta, 2012.
- Nota Keuangan. “*APBN dan APBN-P 2013*” Kementerian Keuangan RI, 2013.
- Prathama Rahardja & Mandala Manurung.”*Pengantar Ilmu Ekonomi Mikroekonomi & Makroekonomi*” Lembaga Penerbit Fakultas UI. Jakarta, 2008.
- Ross, et. al “*Corporate Finance*” A Division of The McGraw- Hill Companies, Inc. 1221 Avenue of the Americas. New York, NY, 10020. 2002.
- Sadono Sukirno. “*Makro Ekonomi Teori Pengantar*” PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta, 2012.

- Samuelson, Paul. A dan Nordhaus “ *Ilmu Makro Ekonomi* “ Penerjemah : Gretta, Theresa Tanoto, Bosco Carvallo dan Anna Elly. PT. Gramedia Global Edukasi. Jakarta, 2004.
- Sekaran, Uma. “*Research Methods for Business*” Penerjemah Kwan Men Yon, Jakarta, Salemba Empat, 2006.
- Suliyanto. “*Ekonometrika Terapan Teori dan Aplikasi*” CV. ANDI. Yogyakarta, 2011.
- Sutrisno Nandang. “*Pemajuan Kepentingan Negara-Negara Berkembang Dalam Sistem WTO*” Penerjemah Susi Fauziah IMR Press, Cianjur, 2012.
- Todaro, Michael dan Smith C. Stephen. “*Pembangunan Ekonomi*” Penerjemah Haris Munandar, Penerbit Erlangga. Jakarta, 2006.
- Tulus Tambunan. “*Perekonomian Indonesia Kajian Teoritis dan Analisis Empiris*” Ghalia Indonesia. Bogor, 2012.
- Undang-undang No. 25 Tahun 2007 Tentang “Penanaman Modal” Kementrian Perdagangan RI, 2007.
- W.I.M.Poli. “*Tonggak-tonggak Sejarah Pemikiran Ekonomi*” Brilian Internasional, Sidoarjo, Jatim, 2010.
- Wing Wahyu Winarno. “*Analisis Ekonometrika Dan Statistik dengan Eviews*” Yogyakarta, 2007.
- Yuyun Wirasasmita, “*Ilmu Ekonomi Makro Advance*” Buku Ajar, FE Unbor Jakarta 2012.
- Yuyun Wirasasmita. “*Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis Advance*” Buku Ajar, FE Unbor. Jakarta, 2012.

Ibu Dr. Francisca Sestri, SE. MM ; Pondok Kelapa Permai Jl. Nyiur 8, AE 12 no 4 Kalimalang Jakarta Timur.